**D A F T A R I S I**

|  |  |
| --- | --- |
| **KEBIJAKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN STUDI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN BIDANG E-KTP DI KANTOR KECAMATAN TANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN –** *Muhammad Aly Umar* |  |
| **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH SEBAGAI ORGANISASI BELAJAR EFEKTIF BERBASIS LAYANAN PRIMA DI SMP NEGERI 12 SURABAYA-** *S u k e s i* |  |
|  |  |
| **ANALISIS *RATIO LIKUIDITAS*, *RATIO SOLVABILITAS* DAN *RATIO RENTABILITAS* TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA KPRI BHAKTI PERTIWI LAMONGAN-** *Evi Yulia* |  |
|  |  |
| **PERANAN SEKTOR POTENSIAL DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN**  **(Studi Kasus Wilayah Di Kabupaten Lamongan)-** *Laily Chodariyanti, Abid Muhtarom* |  |
|  |  |
| **PENDEKATAN EKONOMI ISLAM DALAM TINJAUAN SEJARAH -***Achmad Fageh* |  |

**Kebijakan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Bidang**

**e-KTP Di Kantor Kecamatan Tanakan Kabupaten Pamekasan**

**Muhammad Aly Umar \*)**

Program Studi Ilmu Administrasi STIA Bayuangga Probolinggo

Jl. Slamet Riyadi, Kanigaran, Probolinggo

### email: [tagirwijaya99@gmail.com](mailto:tagirwijaya99@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah di gulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat borokrasi pemerintahan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tentunya daerah dapat memanfaatkan peluang untuk mengatur tetang E-KTP (Pelayanan E-KTP) yang telah diatur pelayan secara implisit telah diatur dalam kitab undang-undang administrasi pemerintah dan produk hukum lainnya seperti keputusan menteri pemberdayaan aparatur negara (kepmenpan) No.63/Kep/M.Pan/7/2003 rena trantentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. hal itu dikarena tranpansi sistem pelayanan kurang dirasakan oleh masyarakat tidak tahu informasi mengenai keputusan kebijakan tentang prosedur atau tata cara pelaksaan E-KTP sehingga menghambat pelaksanaan E-KTP, Adapun kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal maupun eksternal didasarkan atas beberapa hal antara lain : bahwa dalam perekaman E-KTP faktor internalnya iaah bahwa program e-KTP bersifat dadakan, sering terjadinya jaringan eror, dan sering terjadinya mati dikarenakan radius antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelaksaan jaraknya jauh, berdasarkan temuan peneliti ternyata masyarakat memiih mencari nafkah daripada ikut serta dalam rangka mensukseskan program E-KTP. Dengan demikian pemerintah harus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Dengan memperjelas sistem pelayanannya, penyuluhan dan pelatihan sumberdaya manusia serta regulasi pelayanan yang terarah supaya tidak terjadinya mis understanding antara pelayan dan yang dilayani. Berpijak pada fenomena diatas maka peneliti mengangkat beberapa masalah dikantor kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan.

**Kata kunci : Kebijakan, administrasi kependudukan, pelaksanaan E-KTP**

**ABSTRACT**

*Exercising regional autonomy which has been rolled out by the government since 2001 to bring changes in the implementation of local government. One of those changes is the provision of wider authority in some areas of goverments adiministration. Along increased breadth of this authority, The local government bureauchracy to manage and menyelenggaraan public servants to better suit the needs of the community. Certainly take the opportunity to set the area of E-ID card (e-ID services) that have been implicitly set diataur services in the book of government Administration act and otherproduct such as the law minister of state apparatus empowerment ( kepmenpan) No.63/Kep / M.Pan/7/2003 abaot general guidelines for the implementation of pubic service. It dikarena care system less transparency perceived by the public and the pubic does not even know the information abaot policy decisions abaout procedures or procedures for prefenting the implementation of E ID E-KTP, The constrains faced by both internal factor is that the e KTP Program is improptu, frequent occurrence of network errors, and frequent occurrence of power failure, etc., aqnd externa factors is that people complain abaout tranportation because the radius of the residence where the implementation of remote areas, based temuaan researches apparenty people prefer to make a living rather than taking part in the succes of e-ID card program. Thus the government should strive to improve the quality of sevice to the public by caryfing system services, education and training of human reources and regulatory services that focus not the mis understanding between the servant and the served. Building on the phenomenon above, the researcher raised several issues at the district office tlanakan pamekasan.*

***Keywords : policy, population administration, the implementation of E-KTP***

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya. Dengan hadirnya undang-undang otonomi daerah diberi wewenang melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat lokalitas dalam menumbuhkembangkan sumber daya manusia maupun sumber daya manusia dalam rangka bertujuan demi kesejahteraan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu ialah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintah, antara lain di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 telah ditegaskan secara terperinci urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang meliputi 16 urusan wajib yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan; perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulan masalah sosial; pelayanan bidang ketenagakerjaan; fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertahanan; pelayan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintah; pelayanan administrasi penanaman modal; penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib lainnya yang diamankan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping urusan wajib tersebut, di dalam ayat (2) pasal yang sama dijelaskan pula mengenai urusan pemerintahaan kabupaten/kota pemerintahaan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan berpotensi unggulan daerah yang bersangkutan. Seiring bertambahnya luasnnya kewenangan, maka aparatur birokrasi pemerintahaan didaerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sebagaimana dikemunakan Adisasmita (2011) otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokkaitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintahan daerah.

Namun, hingga sekarang ini kualitas pelayanan masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses,prosedur yang berbelit-belit ketika harus menguru kebutuhan masyarakat, seperti pelayan bidang kesehatan, pelayanan bidang keternagakerjaan, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal dan penyelenggaran pelayanan dasar lainnya. Biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan pubik di indonesia. Di mana hal ini juga sebagai akibat dari berbagai permasalahan pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakyat. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, uang dengan sangat mudah mendapatkan segala keinginan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antara yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan perekonomian yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa indonesia secara keseluruhan. Kemudian, terdapat kecenderungan diberbagai instansi pemerintah pusat yang enggan menyerahkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah otonom, akibatnya pelayanan publik menjadi tidak efektif, efisien dan ekonomis dan tidak menutup kemungkinan unit-unit pelayanan cenderung tidak memiliki responsibilitas, reponsivitas dan tidak representative yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Banyak contoh yang dapat di indikasikan: seperti pelayan dibidang pendidikan, kesehatan, transformasi,pelayanan kependudukan dan catatan sipil, fasilitas sosial, dan berbagai pelayanan dibidang jasa yang dikelola pemerintahan daerah belum memuaskan masyarakat, kalah dengan pelayanan yang dikelola oleh pihak swasta. Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan yang masih belum mengalami perubahan secara signifikan. Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparatur negara dilingkungan birokrasi yang masih menempatkan diri untuk dilayani bukannya untuk melayani bukan dilayani, di era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi perlu menyadari pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun , yang dimanefestasikan antara lain dalam perilaku birokrasi“ melayani bukan dilayani”, mendorong bukan menghambat”, mempermudah bukan memperhambat, “sederhana bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya segelinting orang”(Didjaja,2003)

Transpansi, renponsibilitas dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat tentunya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam manjemen pelayanan publik : three Es (efisien, efektif, ekonomis). Agar pelayanan publik berkualitas, sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula berorientasi pemerintah sebagai penyedia menjadi pelayanan yang berorientasikan pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tidak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera memulai mungkin mendengarkan suara publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan pubik. Gagasan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami perubahan seiring meningkatnya tuntutan rakyat dan perlembagaan pemerintah itu sendiri, namun masih belum memuaskan dalam arti posisi masyarakat dan pemerintah sudah mulai menguntungkan dalam kerangka pelayanan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan nomor induk kependidikan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen kependudukan. Selanjutnya, penduduk Indonesia juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat dengan (KTP). Karena KTP tersebut mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009*.* Saat Ini juga penerapan kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvisional di indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini belum menyebabkan adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seuruh indonesia. Dalam Program penerapan E-KTP tersebut bersasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) nasional yang untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal dengan demikian mempermudah penduduk ataupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah ataupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. KTP ini juga wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiiki izin tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau teah kawin. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan lahirnya bersangkutan.

Sementara itu E-KTP merupakan kartu tanda penduduk yang baru saja diluncurkan oleh pemerintah yag salah satu tujuannya untuk mengurangi kerangkapan data dan digencarkan untuk mencegah teoritis. Selain itu E-KTP mempunyai kelebihan dengan yang terdahuu, karena E-KTP belum lama diluncurkan dan peralatannya masih terbatas serta sosialisasinya yang kurang maka belum semua daerah bisa mendapatkan E-KTP tersebut, hal itu karena transparansi sistem pelayanan kurang dirasakan oleh masyarakat dan bahkan masyarakat tidak tahu mengenai informasi mengenai keputusan kebijakan tentang prosedur atau tatacara pelaksanaan E-KTP sehingga menghambat pelaksannan E-KTP, adapun kendala-kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal didasarkan atas beberapa hal antara lain : bahwa dalam perekaman E-KTP faktor internalnya ialah bahwa program E-KTP bersifat dadakan, sering terjadinya jaringan eror, dan sering terjadinya mati lampu, dll, dan faktor eksternalnya ialah bahwa masyarakat mengeluh mengenai transportasi dikarenakan radius antara tempat tinggal masyarakat dengan tempat pelaksanaan jaraknya jauh, berdasarkan temuaan peneliti ternyata masyarakat lebih memilih mencari nafkah daripada ikut serta dalam mensukseskan program E-KTP. Dengan demikian pemerintah harus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan memperjelas sistem pelayanannya, penyuluhan dan pelatihan sumberdaya manusia serta regulasi pelayanan yang terarah supaya tidak terjadinya *misunderstanding* antara pelayan dan dilayani.

Berpijak pada fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat kebenarannya melalui wadah penelitian ilmiah ini yang diformat dalam judul : kebijakan UU No23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan “ Studi Tentang Pelayanan Bidang E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan). Pelaksanaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) bagaimana implementasi kebijakan pelayanan publik bidang E-KTP dikecamatan tlnakan (2) kendala dan permasalahan apa yang dihadapi dalam peaksanaan pelayan publik bidang e-KTP dikecamatan tlanakan dan bagaimana solusi pemecahannya serta prospek kedepan. Penelitian dilakukan di kecamatan Tlanakan kabupaten pamekasan adalah tentang kebijakan UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependuduka” studi tentang pelaksanaan pelayanan bidang e-KTP di kantor kecamatan tlanakan kabupaten pamekasan) bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan kebijakan publik bidang e-KTP dan solusi pemecahannya serta prospek kedepan. Penelitian yang dilakukan berusaha mendapatkan temuan yang lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan tema penelitian. dari hasil peneitian tersebut diharapkan akan mengungkap bagaimana kebijakan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( studi tentang peaksanaan pelayanan di bidang e-KTP Dikecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) akan berguna : (1) bagi pemerintah untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah Dikecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan tentang implementasi kebijakan pelayanan publik dibidang E-KTP sebagai desentralisasi dan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; (2) hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat umum; dan (3) bagi penelitian selanjutnya , hasil pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan E-KTP. Menurut Kasim (2002) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pealyanan publiknya, berdasarkan analisis crosstab (uji-*chi sqhuare*), yakni aspek kesederhanaan (prosedur peaynan yang berbeit-belit), aspek kejelasan (adanya tranparansi biaya yang dikeluarkan), aspek akurasi (urusan sesuai dengan yang dikehendaki), aspek keamanan (bukti tanda terima diberikan), dan aspek kemudahan akses (jarak lokasi kantor dan tempat tinggal dan ketersediaan angkutan umum ke lokasi kantor).

**METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian dekskriptif kualitatif, dimana metode ini menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Pengamatan yang dilakukan sampai pada pemahaman secara mendalam, sehingga tidak terjerat dalam pengetahuan tentang suatu informasi dianggap sudah final. Pernyataan tersebut searah dengan yang dikatakan oleh Bogdan (2005) bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati”. Penggunaan pendekatan kualitatif, karena: 1) lebih fleksibel 2) dapat menyajikan secara langsung hubungan antara penelitian dan responden 3) lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Terjadi pembiasan kajian serta tidak menyimpang dalam pencarian data. Dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu fokus penelitian sebagai wahana untuk membatasi studi, “pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan presepsi seseorang terhadap adanya suatu permasalahan” (Moleong 2005:92). Dengan kata lain, fokus itu memacu penelitian untuk mengarahkan pengumpulan data.

Tekhnik pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan (*field research)* yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung kelpangan yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapngan atau *field research*  ini meliputi : (1) *Observasi*  yaitu tekhnik penelitian pengamatan secara sistematik terhadap data menjadi obyek penelitian yang akan diteliti; (2) *Interview,* yaitu penelitian dengan mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan responden yang menjadi objek penelitian; (3) *dokumentasi,* pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen, baik berupa mempelajari dokumen-dokumen, baik berupa catatan-catatan, pedoman-pedoman, peraturan dan foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.Dalam analisa data ini peneliti menggunakan analisis dengan menggunakan model interaktif. Analisa data model interaktif terdiri atas tahap-tahap yaitu : (1) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; (2) penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik penyajian dalam bentuk tabel naratif guna menggabungkan informasi yang tersusun kedalam yang padu (3) Menarik kesimpilan / verifikasi yaitu mencatat keteratruran, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi peneliti menurut Huberman dalm (Sugiono,2012).

Ketiga analisa data ini digunakan dalam penelitian agar data yang diperoleh senantiasa berjalan dengan fokus penelitian. Berdasarkan penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa data yang telah terkumpul direduksi berupa pokok-pokok temuan penelitian yang relavan dengan permasalahan, selanjutnya disajikan data, baik dalam bentuk data teks narasi, grafik, dan sebagainya, kemudian ditarik kesimpulan sementara untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. kegiatan alasisis interaktif tersebut, secara terus menerus berinteraksi dan berputar selama proses penelitian berlangsung sampai peneliti memperoleh makna permasalahan yang dikaji atau dibahas dalam penelitian. Untuk melihat derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian terhadap hasil penelitian diperlukan suatu standarisasi dalam penelitian kualitatif, standar tersebut keabsahan data diperlukan pelaksanaan tekhnik pemeriksaan dengan didasarkan pada empat (4) macam kriteria : (1) Kredibilitas; untuk memperhatikan derajat kepercayaan temuan dengan jalan pembuktian oleh penelitian pada kenyataan ganda yang sedang diteliti dengan cara : (a) memperpanjang masa observasi, dengan diedit dan kemudian diadakan penegecekan kembali kelapangan; (b) pengamatan secara seksama atau tekun, dalam kegiatan ini pengamatan dalam kegiatan atau pelaku atau aktor yang menjadi obyek penelitian; (c) membicaranya dengan orang lain sebagai usaha untuk memenuhi derajat kepercayaan dengan sejawta serta berkonsentrasi dengan pembimbing penelituian; (d) Triangulasi adalah untuk mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang lain yaitu dengan dari data dokumen dengan hasil wawancara dan sebaiknya; (e) mengadakan member ceck yaitu mengecek ulang secara garis besar setelah wawancara dengan para informan penelitian apakah sudah selesai belum, atau masih memerlukan perubahan sesuai yang diketrahui informan serta dengan mengkonfirmasikan dengan penggali data; (2) keteralihan ( *tranferbility)* keteralihan hasil penelitian biasanya berkenaan dengan pertanyaan sehingga hasil penelitian ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain. Untuk memenuhi kriteria ini maka penelitian berusaha untuk menyajikan hasil penelitian dengan mempercaya wawana ilmiah melalui suatu dekskripsi secara terperinci; (3) Ketergantungan (dependibility) ; hal ini berkaitan dengan kemampuan hasil studi untuk diulang kembali atau dibuat replika atau uji ulang, yakni mengganti konsep realibilitas, disamping itu juga digunakan tekhnik-tekhnik yang untuk kredibilitas; (4) Kepastian (conformability) ; untuk mewujudkan kepastian tersebut maka peneliti mendiskusikan dengan pembimbing dan setiap tahap dalam penelitian ini maupun konsep yang dihasilkan dari lapangan dikonsultasikan dengan pembimbing pula menurut Huberman dalam (Sugiono: 2012).

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Pelayanan Publik**

Kantor Kecamatan Tlanakan pada pelayanan KTP adalah menggunakan UPTSA ( Unit Pelayanan Satu Atap) dikarenakan keterbatasan peralatan dalam pelaksanaan E-KTP. Akan tetapi dalam pelaksanaan KTP ini di awali dengan melakukan sosialisi untuk memberikan transparansi tentang pelayanan yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan E-KTP yang terpenting adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu terutama pada petugas dan dilanjutkan pensosialisasian terhadap masyarakat tentunya harus bisa memahami. Sehubungan dengan transparansi pelayanan E-KTP, maka diperlukan keseriusan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tentunya harus mempertemukan *framework* antara pelayanan dan yang dilayani, sehingga pelayanan tepat guna dan terarah sesuai dengan keinginan bersama.

Temuan sebelum peneliti melakukan wawancara terdapat berbagai persoalan menegenai pelayanan yaitu bahwa masyarakat belum merasakan bentuk transparansi pelayanan, masyarakat tidak menghiraukan atas pelaksanaan E-KTP Sehingga hal itu menghambat terlaksanaannya pelayanan E-KTP. Sosialisasi yang berbentuk penyuluhan hanya berlaku pada pelaku pelayanan E-KTP baik petugas di internal kecamatan dan aparatur desa saja akan tetap masyarakat kurang banyak mendapatkan perhatian intens. Ketika ditanya masyarakat lebih memilih meneruskan pekerjaannya daripada ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP. Tentunya melihat kondisi di atas, pemerintah harus memberikan pemahaman tentang pentingnya E-KTP. Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa demi mencapai kemudahan dan kesederhanaan pelayanan E-KTP, Instansi pemerintahan harus memberikan pelayanan yang terbuka bagi masyarakat. Karena transparansi sistem pengelolaan pelayanan pelayanan E-KTP akan membuka ruang partisipasiatif dan antusiasme masyarakat sesuai yang diharapkan. Sebagaimana peneliti temukan dilapangan melalui petugas perekaman E-KTP dan masyarakat sekitar kecamatan Tlanakan , bahwa untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik , tentunya harus dimulai dari *humannya*  dan yang terpenting transparansi pelayanan terhadap masyarakat tepat sasaran. Di dalam Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa macam program berkenaan dengan pelayanan. Tetapi peneliti menitik beratkan pada pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, karena bagi peneliti indikator suksesnya dalam pelaksanaan E-KTP adalah pelayanan yang berkualitas dengan prinsip-prinsip dasar *three es : efektif, efesien, dan ekonomis.* Adapun kebijakan dari Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan adalah guna meningkatkan pelaksanaan pelayanaan terhadap masyarakat . Transparansi pelayanan E-KTP ini dimulai dengan pensolidan tim pelaksana pelayanan KTP di internal Kantor Kecamatan Tlanakan setelah itu melakukan sosialisasi melalui mitra kerja yaitu Kepala Desa, sekertaris desa dan perangkatnya, hal ini akan memberikan keterbukaan terhadap masyarakat terhadap program E-KTP, karena dengan begitu masyarakat akan mengetahui prosedur atau tata cara pelaksanaan E-KTP. Pada pelaksanaan E-KTP hal yang terpenting adalah memberikan pemahaman terlebih dahulu terutama pada petugas dan dilanjutkan dengan pensosialisasian terhadap masyarakat, karena petugas merupakan pelayanan bagi masyarakat tentunya harus bisa memahami.

Sehubungan dengan transparansi pelayanan E-KTP, maka diperlukan keseriusan dalam memberikan pelaynan terhadap masyarakat, tentunya harus mempertemukan *framework* antara pelayan dan yang dilayani, sehingga pelayanan tepat guna terarah sesuai dengan keinginan bersama. Temuan sebelum meneliti melakukan wawancara terdapat berbagai persoalan mengenai pelayanan yaitu bahwa masyarakat belum merasakan bentuk transparansi pelayanan, masyarakat banyak tidak menghiraukan atas pelaksaan E-KTP, sehingga hal itu menghambat terlaksananya pelayanan E-KTP. Sosialisasi yang berbentuk penyuluhan hanya berlaku pada pelayanan E-KTP baik petugas di internal kecamatan dan aparatur desa saja akan tetapi masyarakat kurang banyak mendapatkan perhatian intens. Ketika ditanya masyarakat lebih memilih meneruskan pekerjaannya daripada ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP. Tentunya melihat kondis diatas, pemerintah harus memberikan pemahaman tentang pentingnya E-KTP. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima Sinambela (2006: 5-6) menjelaskan yang tercermin dari : (1) transpanrasi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan cepat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti; (2) akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ; (3) kondisional, yakni pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas; (4) partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,kebutuhan, dan harapan masyarakat; (5) kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain; dan (6) keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik. Kegiatan yang dilakukan tersebut untuk sekarang telah membuahkan hasil sehingga masyarakat merasa senang dan mudah dalam peggunaan fasilitas yang diberikan sehingga pelaksanaan pelayanan tersebut berjalan lancar dan masyarakat tidak lagi kebingungan melakukan berpartisipasi dalam perekaman e-KTP. Argumen peneliti menyatakan bahwa pengelolaan pelayanan e-KTP ini bisa membantu untuk meningkatkan pelayanan berkualitas dibidang e-KTP tentunya pertisipasi masyarakat dalam mensukseskan pelayanan tersebut sangat diperlukan peran aktif masyarakat. Karena dalam penyelenggaraan pelayanan tidak akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Sebaliknya pemerintah harus konsisten (*All-out)* dalam memberikan pelayanan yang dilihat dari sarana fisik yang kasat mata, dengan indikator-indikatornya yang meliputi sarana parkir, ruang tunggu, jumlah pegawai, media informasi pengurusan, media yang informasi keluhan, dan jarak ke tempat layanan. Kedua adalah *Reability,* yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan dan kehandalan dalam menyediakan layanan yang terpercaya, meliputi proses waktu penyelesaian layanan dan proses waktu pelayanan keluhan. Ketiga, bertitik tolak dari kemampuan dan kehandalan yang dimiliki, untuk selanjutnya indikator kualitas pelayanan pun harus ditunjang dari sisi *Responsivenessnya,* yaitu kualitas yang dilihat dari sisi kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara tepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Keempat adalah *Assurance,* yaitu kualitas pelayanan yang dilihat dari sisi kemampuan petugas dalam meyakinkan kepercayaanalah dengan adanya kejelasan mengenai masyarakat. Adapun indikator-indikatornya adalah dengan adanya kejelasan mengenai mekanisme layanan dan kejelasan mengenai tarif layanan. Kelima adalah *Empathy*, yaitu kualitas pelayanan yang diberikan berupa sikap tegas tetapi penuh perhatian terhadap masyarakat (konsumen). Dalam konteks ini, indikator yang dilihat adalah adanya sopan santun petugas selama proses pelayanan berlangsung. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang sangat besar harapannya karena sama-sama menguntungkan antara pelayanan dan pelanggan karena jika pelaksanaan seirama dalam arti (*Ceck and Balance)* maka pelayanan dan pelanggan sama-sama merasakan dampak dari pelayanan yang berkualitas itu, berkenaan hal diatas, bahwa pelayanan e-KTP akan membantu untuk mempermudah pendataan penduduk indonesia.

**Implementasi Kebijakan Menejemen Pelayanan Publik**

Berdasarkan keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/117A/432.131/2012. Tentang Tim Kelompok Kerja Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kecamatan Tlanakan Pasal 5 : Tim POKJA Kecamatan Tlanakan mempunyai tugas melakukan sosialisasi penerapan kartu tanda penduduk elektronik; mempersiapkan tempat pelayanan Kartu tanda penduduk elektronik; mempersiapkan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; mempersiapkan surat pemanggilan penduduk wajib e-KTP; melakukan fasilitasi, mobilisasi penduduk, wajib e-KTP, dll, terhadap kartu tanda penduduk elektronik ; melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan melakukan perekaman wajib e-KTP. Sedangkan teknis pelaksanaan pelayanan e-KTP ialah : (1) prosedur/tata cara proses layanan e-KTP adalah menyediakan ruang (tempat) tunggu warga, meja dan kursi, dan petugas sortir dan petugas aparator; (2) rincian jumlah penduduk, wajib KTP dan TMT adalah total jumlah penduduk kecamatan Tlanakan : 61.040 orang, jumlah wajib KTP untuk proses e-KTP : 45.302 orang, ada KTP SIAK masih berlaku sampai tahun 2014, dan (TMT) 5 Tahun, dan tanpa dipungut biaya. Untuk tata kerja pelayanan E-KTP ada dan sangat sesuai pelayanan, petugas sortir ( pemanggilan waktu antrean dan Transportasi untuk warga pada waktu proses perekaman), tidak hanya kebijakan bagi yang sakit/usia senja didahulukan, sabar dan penuh tanggung jawab, dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan aspek masyarakat antara lain : (1) akses informasi antara lain : (a) sosialisasi serta tindak lanjut informasi serta pemberitahuan kepada Kepala Desa; (b) banyak manfaatnya, sebagai Kartu Tanda Penduduk yang baru; dan (c) cukup sabar (antusias warga tinggi ); (2) Tahapan prosedur pelayanan e-KTP adalah terima undangan, absensi, antre menunggu panggilan petugas sortir e-KTP, dan masuk ruangan menuju petugas operator e-KTP. Sementara itu untuk akuntabilita pelayanannya antara lain : (1) tanggung jawab petugas terhadap efektifitas keberlanjutan pelayanan prima Kecamatan Tlanakan ; dan (2) dengan adanya e-KTP, identitas data kependudukan lebih akurat (benar/valid) dan rasa kesadaran dan antusias warga tinggi. (Data Dokumentasi : Tanggal 13-02-2013). Kebutuhan informasi mengenai tata cara pelayanan e-KTP ini akan membantu mensukseskan pelayanannya sesuai dengan target. informasi kebijakan pelayanan terlalu lama sedangkan antreannya membludak, hal ini disebabkan oleh mis *understanding* masyarakat terhadap informasi terhadap dari tim penyampai informasi tersebut kurang tepat sasaran, sehingga masyarakat lebih memilih memenuhi kebutuan pekerjaannya daripada informasi tersebut. Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa demi mencapai kemudahan dan kesederhanaan pelayanan e-KTP, Instansi pemerintah harus memberikan pelayanan yang transparan bagi masyarakat karena transparansi sistem pengelolaan pelayanan e -KTP, instansi pemerintahan harus memberikan pelayanan yang terbuka bagi masyarakat. Karena transparansi sistem pengelolaan pelayanan e-KTP akan membuka ruang partipasiatif serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan dimulai dengan memahami programnya terdahulu supaya kegiatan yang dilaksanakan searah dengan rencana pelayanan tersebut, (Pasolong,2012), menjelaskan makna implementasi kebijakan ini dengan mengatakan bahwa : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian – kejadian dan kegiatan – kegiatan yang timbul setelah di sahkannya pedoman – pedoman dan kebijakan Negara yang mencangkup baik usaha – usaha untuk mengadministrasikannya maupun menimbulkan akibat atau dampaknya nyata pada masyarakat atau kejadian – kejadian. Maksudnya ialah pelaksanaan keputusan dasar biasanya dalam bentuk undang – undang namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan – keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan yang lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tega tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktukan atau mengatur proses implementasinya. Hal diatas akan memperkuat dalam penyelenggaraannya mengenai pelayanan. Akan tetapi terkait dengan sosialisasi, instansi pemerintah tidak sendiri dalam melakukannya, melainkan harus melibatkan masyarakat karena kedua sumber daya ini harus berjalan selara demi pencapaian tujuan. Dari temuan dilapangan dan didukung oleh teori diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa selain SDM yang harus diperhatikan dalam mensosialisasi kebijakan, namun faktor sarana yang mendukung akan mempengaruhi dan mempercepat proses pelaksanaan berkenaan dengan sosialisai kebijakan pelayanan tersebut. Kesimpulnya terbuka dalam segala kritik dan saran maupun keluhan, dan menyediakan seluruh informasi yang diperlukan dalam pelayanan penyelenggaraan pelayanan harus memiliki berbagai instrumen yang memungkinkan masyarakat pelanggan menyampaikan keluhan, kritik maupun saran, serta harus menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat secara proaktif.

**Kendala – Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakannkecamatan Tentang Pengelolaan Pelayanan E-KTP**

Seperti diketahui bersama bahwa sampai saat ini persepsi masyarakat khususnya mengenai pelayan masih dinilai relatif negatif. Pelayanan masih menjadi momok bagi banyak orang. Hal ini dipicu oleh traumatic masalalu, yang menggunakan sistem pelayanan E-KTP mampu menggugah partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan E-KTP Kecamatan Tlanakan ini telah mampu membantu pemerintah, yaitu dengan pendisiplinan catan kependudukan melalui inovasi dari KTP Manual menuju KTP Elektrik. Akan tetapi keberhasilan dalam pelaksanaan E-KTP tentunya dihadapkan banyak kendala-kendala baik Internal Dan Eksternal. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut : (1) internal, antara lain : (a) mengenai kondisi pelayanan E-KTP secara keseluruhan, kendala yang dihadapi ialah masih seputar *lack of acces* dan *lack of data assesment (*penanganan khusus) dimana setiap masyarakat harus menempuh jarak yang jauh ke tempat perekaman dan mendahulukan masyarakat yang lanjut usia. Kendala-kendala itu jugalah yang membuat kewalahan dan membuat masyarakat tidak nyaman karena tidak urut sesuai nomer antran; (b) pelayanan E-KTP melalui internet terkadang terhambat oleh gangguan tekhnis baik jaringan (harus ditunda) baik maupun padamnya listrik; dan (c) Masyarakat kurang mendapatkan informasi dan kurang memahami prosedur tata cara pelaksanaan E-KTP. Dari pemaparan diatas, bahwa kendala-kendala tersebut merupakan fenomena konflik dalam organisasi, (2) Eksternal, antara lain : (a) penyebaran informasi kurang tepat sasaran, karena tujuan utama penyebaran informasi pelaksanaan E-KTP adalah untuk memberikan pengertian dan penyadaran bagi masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan perekaman E-KTP; (b) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sehingga petugas bekerja ekstra dan memberi penyadaran secara langsung pada masyarakat; (c) masyarakat kurang memahami prosedur tatacara proses perekaman E-KTP sehingga menghambat proses pelaksanaan pelayanan E-KTP; dan (d) kurangnya harmonisasi secara menyeluruh antara masyarakat dengan petugas. Kendala-kendala dari pelaksanaan E-KTP tersebut masih belom maksimal diselesaikan akan tetapi kecamatan tlanakan telah berusaha mengantisipasi dengan lebih banyak pendekatan terhadap masyarakat yaitu dengan melakukan penyuluhan tentang pentingnya E-KTP, serta fungsi dan manfaatnya, karena dengan tindakan tersebut akan mengurangi kendala-kendala, baik kendala internal maupun eksternal; dan (3) upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyaraka. Kantor Kecamatan Tlanakan merencanakan program pelayanan E-KTP dengan melalui komitmen dan kesadaran masyarakat diharapkan bisa membantu guna meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP. Upaya – upaya yang dilakukan sebagai berikut : (1) upaya pengembangan sumberdaya manusia baik yang berupa pelatihan magang, penyuluhan terhadap pegawai atau petugas pelayanan E-KTP; (2) Menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik masyarakat dan petugas terutama prosedur pelaksanaan E-KTP, Sehingga tidak terjadi understanding pemahaman oleh masyarakat; dan (3) perlu dilakukan suatu regulasi tentang pelaksaan pelayanan E-KTP dengan pemanfaatan sumberdaya manusia dalam rangka menunjang kesinambungan antara pelayan dan yang dilayani, peningkatan kualitas dan produktifitas pelayanan pemerintah dan pastisipasi masyarakat demi menunjang pelayanan yang berbasis kemasyarakatan. Dengan pastisipasi masyarakat tentunya akan menemukan kerjasama yang baik tidak akan menimbulkan diskriminatif atau keberpihak sepihak dalam memberikan pelayanan. Partisipasi masyarakat antara lain mengawasi dan mengontrol keberadan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dari pemaparan diatas, bahwa dalam pelaksanaan pelayanan E-KTP guna meningkatkan kualitas pelayanan, diperlukan peran serta proaktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan E-KTP demi terciptanya kualitas pelayanan. Karena hal itu akan mempengaruhi timbulnya rasa memiliki pemerintah dalam melakukan upaya-upaya tersebut. Maka, yang harus ditimbulkan adalah harmonisasi antara instansi pemerintah dan masyarakat, dengan begitu akan terjadinya saling konrol atau *ceck and balance* antara kedua belah pihak.

**SIMPULAN**

Berdasarkan temuan dan pembahasan kebijakan UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan (Studi Tentang Pelaksanaan Pelayanan Didang E-KTP Di Kantor Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan) maka dapat disimpulkan : *pertama,* transparansi sistem pelayanan terhadap masyarakat antara lain : (1) menejemen pelayanan publik merupakan salah satu dari bagian dalam pembangunan nasional yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yaitu transparansi sistem pelayan dengan melakukan sosialisasi hal itu dilaksanakan karena pelayanan publik adalah sarana bagi masyarakat dalam mengadukan perkara apapun yang berkenaan dengan kebutuhan masyarakat demi kelangsungan hidup bernegara dan kesejahteraan rakyat; (2) pelayanan E-KTP merupakan sub bagian dari seksi pemerintahan di bawah naungan kecamatan tlanakan dan sistem birokrasinya menggunakan UPTSA (Unit pelayanan satu atap) dengan mempunyai tugas membantu tugas-tugas negara dalam pelaksanaan E-KTP di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan; dan (3) Diperlukan suatu kebijakan pengelolaan pelayanan publik dengan pemberdayaan sumber daya manusia dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pembangunan dan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas dan produktifitas pelayanan negara dan partisipasi masyarakat dalam menunjang pelayanan yang berbasis kemasyarakat. Dengan partisipasi masyarakat tentunya akan menemukan kerjasama yang baik dan tidak akan terjadi diskriminasi atau keberpihakan dalam memberikan pelayanan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud ialah saling mengawai dan mengontrol kerja-kerja yang dilakukan pemerintah.

*Kedua,* pemerintah memberikan informasi keputusan kebijakan tentang prosedur atau tatacara tentang pelaksanaan E-KTP, antara lain : (1) adapaun bentuk implementasi dari pihak kecamatan tlanakan sehubungan dengan pengelolaan pelayanan publik meliputi usaha dan kegiatan, yaitu penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan penegasan peraturan (*law eferocement);* (2) Melakukan sosialisasi penerapan kartu tanda penduduk elektronik; (3) mempersiapkan tempat pelayanan kartu tanda penduduk Elektronik; (4) mempersiapkan surat pemanggilan penduduk wajib e-KTP (5) Melakukan fasilitasi, mobilisasi penduduk, wajib e-KTP, dll, terhadap kartu tanda penduduk elektronik; (6) melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik; dan (7) melakukan perekaman wajib e-KTP.

*Ketiga,* kendala internal dan eksternal, antara lain : (1) mengenai kondisi pelayanan e-KTP secara keseluruhan , kendala yang dihadapi ialah mash seputar lack of acces dan lack of data assesment (penanganan khusus) diamana setiap masyarakat harus menempuh jarak yang jauh ketempat perekaman dan mendahulukan masyarakat yang lanjut usia. Kendala-kendala itu jugalah yang membuat kewalahan dan membuat masyarakat tidak nyaman karena tidak urut sesuai nomer antrean; (2) pelayanan E-KTP melalui internet terkadang terhambat oleh gangguan tekhnis baik jaringan (harus ditunda) baik maupun padamnya listrik; (3) masyarakat kurang memahami prosedur tatacara proses perekaman E-KTP sehingga menghambat proses pelaksanaan pelayanan E-KTP; (4) penyebaran informasi kurang tepat sasaran, karena tujuan utama penyebaran informasi pelaksanaan E-KTP adalah untuk memberikan pengertian dan penyadaran bagi masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pelaksanaan perekaman E-KTP; (5) kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sehingga petugas bekerja ekstra dan memberi penyadaran secara langsung pada masyarakat; (7) kurangnya harmonisasi secara menyeluruh antara masyarakat dengan petugas.

*Keempat,*  upaya meningkatkan kualitas pelayanan E-KTP. Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan merencanakan program pengelolaan pelayanan e-KTP dengan melalui komitmen dan kesadaran masyarakat diharapkan bisa membantu guna meningkatkan kualitas pelayanan pajak. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan penyuluhan baik bagi pegawai maupun mayarakat sebagai obyek dari pelayanan pajak. Selain manfaat yang telah diarasakan oleh masyarakat terdapat kendala-kendala yang antara lain terhadap sumberdaya manusia (tingkat pendidikannya) yang kurang memadai diamana rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah sehingga diperlukan upaya pengembangan sumber daya manusia baik berupa pelatihan, magang, dan penyuluhan.

Dalam pelaksanaan menejemen pelayanan publik sebaiknya mayarakat diikut sertakan (penyuluhan dan pemahaman), agar mereka mengetahui secara dekat akan manfaat dari pelayanan publik, antara lain : (1) peningkatan pembangunan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan secara kontinyuitas yaitu dengan mengadakan pelatihan, dan penyuluhan; (2) Lebih meningkatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, karena pelayanan tidak akan berjalan efektif, efisien dan ekonomis manakala pelayanan yang dilaksanakan tidak sepenuh hati; (3) diperlukan perubahan paradigma pelayanan publik yaitu pelayanan yang berorientasi sebagai penyedia menjadi pelayan menuju pelayan yang berorientasikan kebutuhan masyarakat; dan (4) Harmonisasi secara keseluruhan antara pemerintah sebagai aktor pelayan dengan masyarakat sebagai penerima pelaynan untuk dapat mencapai keseimbangan dalam rangka pelaksanaan sistem perekaman E-KTP secara modern. Hal itu pada akhirnya akan dapat memberikan pengaruh yang kondusif terhadap pelaksanaan kebijakan UU No 23 Tahun 2006 (studi tentang pelaksanaan pelayanaan bidang E-KTP di Kantor Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan).

**DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, R. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta

Bogdan, T.2005.*Theories of Human Communication*. 8ed. Canada : Wadsworth

Didjaja, M.2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta

Kazim, A. *Etika Dalam Administrasi Publik : Salah Satu Strategi Utama Untuk Memerangi KKN*. Jakarta : Jurnal Bisnis dan Birokrasi. FISIP UI. Nomor 02/Vol.X/Mei/2002

Moleong, Lexy J.2005.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandug : Remaja Rosdakarya

Pasolong, H.2012.*Metode Penelitian Adminkistrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 perubahan Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2009 tentang Spesifikasi dan Format KTP Nasional dengan pengamanan khusus

Sinambela.2006. *Reformasi Pelayanan Publik : Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : PT.Bumi Aksara

Sugiyono.2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

**Implementasi Kebijakan Kepemimpinan Sekolah Sebagai Organisasi Belajar Efektif Berbasis Layanan Prima Di SMP Negeri 12 Surabaya**

**S u k e s i \*)**

\*)Program Pascasarajana Magister Ilmu Administrasi

Universitas WR.Supratman Surabaya

Jl. Arief Rahman Hakim No.14 Surabaya

### email: [sukesi1021@gmail.com](mailto:sukesi1021@gmail.com)

**ABSTRAK**

Program pengembangan merupakan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. Program pengembangan bersifat jangka panjang (5-10 tahun). Program pengembangan merupakan bagian dari proses perencanaan strategis. Pada saat penyusunan program pengembangan, perencana harus telah menuntaskan tugas-tugas: perumusan atau telaah ulang visi, misi, dan tujuan serta analisis strategis yang meliputi telaah diri, analisis SWOT, penetapan prioritas dan strategi. Program pengembangan secara khusus mencakup pembuatan keputusan tentang siapa yang akan mengerjakan apa dan kapan dan dengan langkah-langkah bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan strategis. Rancangan dan implementasi program pengembangan bergantung pada sifat dan kebutuhan masing-masing sekolah. SMP Negeri 12 Surabaya terletak di JL. Ngagel Kebonsari I Surabaya. Dengan luas + 16.000m2,dan didukung letak sekolah yang jauh dari keramaian, serta jauh dari pusat kota maka menjadikan suasana pembelajaran di SMP Negeri 12 Surabaya kondusif. Hal ini terbukti dengan diraihnya juara Harapan1 Nasional lomba Lingkungan Sekolah Sehat Tahun 2003. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendiskripsikan peran kepala sekolah sebagai supervisor di SMP Negeri 12 Surabaya, 2) mendiskripsikan peran kepala sekolah sebagai administrator di SMP Negeri 12 Surabaya, 3) mendiskripsikan bentuk program sekolah sebagai organisasi belajar berbasis pelayanan prima, 4) mendiskripsikan proses sosialisasi visi dan misi sekolah sebagai organisasi belajar berbasis pelayanan prima, 5) mendiskripsikan persiapan penyusunan Renstra berbasis pelayanan prima pada SMP Negeri 12 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dan karyawan SMP Negeri 12 Surabaya tetap mempertahankan kualitas kinerjanya dan profesionalisme, kepala sekolah mempertahankan kepemimpinannya dan pelaksanaan manajemen pendidikan lebih strategic dan inovatif.

**Kata kunci**: **Program Pengembangan, Rancangan, Implementasi**

**ABSTRACT**

*Development programs are activities designed to achieve the school's vision, mission, and goals. The development program is long term (5-10 years). The development program is part of the strategic planning process. At the time of preparation of the development program, the planner must have completed the tasks: the formulation or re-examination of the vision, mission, and objectives and strategic analysis which includes self-study, SWOT analysis, priority setting and strategy. The development program specifically involves making decisions about who will do what and when and with steps how to achieve strategic goals. The design and implementation of development programs depends on the nature and needs of each school. SMP Negeri 12 Surabaya is located at JL. Ngagel Kebonsari I Surabaya. With an area + 16.000m2, and supported by the location of the school away from the crowd, and away from the city center, making the learning atmosphere in SMP Negeri 12 Surabaya conducive. This is proven by the achievement of the champion of the National Healthy School Contest of 2003. The purpose of this research are: 1) to describe the role of principal as supervisor in SMP Negeri 12 Surabaya, 2) to describe the role of principal as administrator in SMP Negeri 12 Surabaya 3) describe the form of school program as a learning organization based on excellent service, 4) to describe the process of socialization of school vision and mission as a learning organization based on excellent service, 5) to describe preparation of strategic planning based on excellent service at SMP Negeri 12 Surabaya. The results showed that teachers and employees of SMP Negeri 12 Surabaya still maintain the quality of their performance and professionalism, principals maintain their leadership and implementation of management education more strategic and innovative.*

***Keywords: Program Development, Design, Implementation***

**PENDAHULUAN**

Sebagai institusi atau lembaga pendidikan, sekolah menyelenggarakan berbagai aktivitas pendidikan bagi anak didik, dan aktivitas tersebut melibatkan banyak komponen. Aktivitas maupun komponen pendidikan di sekolah menuntut adanya manajemen yang baik dalam rangka mencapai tujuan institusionalnya. Salah satu ciri paradigma baru manajemen pendidikan adalah kewenangan yang luas bagi kepala sekolah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pendidikan di sekolah. Kepala sekolah harus siap menerima dan menjalankan kewenangan tersebut dengan berbagai konsekuensinya. Disamping itu, percepatan perkembagan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang merambah ke sekolah juga semakin membuat kompleks kehidupan dan tantangan tugas kepala sekolah, bukan sebaliknya. Kepala sekolah tidak lagi dapat menerima perubahan sebagaimana adanya, tetapi harus berpikir untuk membuat perubahan dan inovasi di sekolah.

Hasil monitoring tersebut juga menunjukkan bahwa dewasa ini kualitas Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, Administrator Sekolah dirasa belum merata, yang dibuktikan dengan masih rendahnya kualitas beberapa sekolah dalam hal pengelolaan sekolah dan rendahnya hasil belajar siswa dari beberapa sekolah. Tuntutan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan dewasa ini dirasakan sangat meningkat. Masyarakat pada umumnya tidak dapat lagi dipenuhi kebutuhannya atas dasar standar pemerintah semata, melainkan telah dituntut adanya kualitas layanan yang ditentukan oleh kebutuhan masyarakatnya sendiri. Kebutuhan tersebut ditujukan baik terhadap barang privat (private goods) maupun terhadap barang publik (public goods) melalui pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah (Mangkoesoebroto,2010). Pelayanan Prima Dalam Pelayanan Publik Perkembangan tuntutan pelayanan saat ini adalah pelayanan prima atau pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat atau lebih baik dari standar dan asas-asas pelayanan publik/pelanggan. Dalam organisasi publik hal ini sebenarnya telah menjadi tuntutan sejak munculnya teori negara baru (Noor,2012) tentang azas keadilan. Oleh sebab itu dalam pelayanan primapun perlu adanya standar pelayanan sebagai ukuran yang telah ditentukan untuk pembakuan pelayanan yang baik dan berkeadilan. Bila seluruh pelayanan telah memiliki standar maka akan lebih mudah memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga secara kontinyu akan dapat disebut prima. Pelayanan prima dapat digunakan dalam segala bentuk pelayanan dan dalam membangunnya juga dapat melakukan dengan berbagai strategi. Prinsip yang utama dalam pelayanan prima adalah memberikan kepuasan terhadap pelanggan, namun tidak berarti bahwa pelayanan harus mengikuti keinginan pelanggan belaka, akan tetapi harus dipertimbangkan adanya keseimbangan antara kemampuan dan tuntutan pelanggan. Oleh karenanya standar pelayanan, manusia yang melaksanakan serta alat yang digunakan termasuk proses, secara terus menerus dibangun dan dievaluasi merupakan kunci utama. Atas dasar uraian di atas, maka peneliti mengadakan penelitian “implementasi kebijakan kepemimpinan sekolah sebagai organisasi belajar berbasis pelayanan prima di SMP Negeri 12 Surabaya”. Penelitian tersebut selama ini belum banyak dilakukan yang bertujuan tindakan untuk perbaikan pembelajaran.

**Kajian Penelitian Terdahulu**

Beberapa kajian penelitian terdahulu dalam penelitian berjudul :1) “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Kinerja Guru dan Prestasi Siswa”, hasil penelitian ini memaparkan tentang Alternatif/solusi kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan kinerja guru dan prestasi siswa, 2) “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru dan Keterlibatan Orang Tua terhadap Kedisiplinan Siswa”, hasil Penelitian tentang pengkajian kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru dan keterlibatan orang tua siswa dalam hubungannya dengan peningkatan kedisiplinan siswa, 3) “Pengaruh Motivasi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru”, hasil penelitian ini tentang bagaimana caranya memberikan layanan dan bantuan kepada pendidik (guru) untuk dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya, memberikan bimbingan kepada para guru sehingga terpelihara suatu hubungan kemanusiaan yang harmonis dan dapat mentranformasikan hubungan tersebut dalam proses pembelajaran, memberikan rasa aman dan senang sehingga tercipta iklim yang memungkinkan guru dapat tumbuh dan berkembang dalam aktivitas pembelajarannya, memberikan kepercayaan dan penghargaan bagi para guru terutama bagi yang berprestasi agar dapat meningkatkan motivasi kerja guru sehingga dicapainya kepuasaan kerja para guru yang pada ahirnya dapat meningkatkan kinerja guru, 4 “Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru”, hasil penelitian ini memaparkan tentang bagaimana gaya dan upaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru, 5) “Upaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Guru”, hasil penelitian ini memaparkan tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan prestasi kerja dan difokuskan pada dua macam pembinaan. Dari beberapa kajian penelitian sebagai penunjang dan pengembangan maka penelitian ini lebih menekankan pada pengkajian tentang implementasi kebijakan kepala sekolah dalam membina guru secara detail, lebih dalam dan tajam.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini permasalahan yang diangkat adalah kegiatan yang berkaitan dengan implementasi strategi kebijakan kepemimpinan efektif berbasis pelayanan prima, yang dilakukan di SMP Negeri 12 Surabaya. Model yang digunakan adalah model studi kasus yaitu karakteristik model studi kasus menurut Gudnanto (2011) bahwa diakuinya kenyataan yang tidak sepihak (*multi realities*). kenyataan adalah sesuatu yang berhubungan dengan konteks dan persepsi individu yang terlibat didalamnya. Jadi bukan kenyataan yang dipersepsi oleh peneliti atau orang yang memberi tugas pada peneliti. Oleh karena itu persepsi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan implementasi kebijakan kepemimpinan sekolah efektif berbasis layanan prima seperti guru, guru pemandu, pembina dan lain-lain harus diperhatikan peneliti. Lokasi penelitian ini dipilih pelaksanaan implementasi kebijakan kepemimpinan sekolah efektif berbasis layanan prima di SMP Negeri 12 Surabaya didasarkan atas pertimbangan bahwa meskipun selama ini kegiatan tersebut di tempat ini dilaksanakan secara kontinyu, tetapi dalam pelaksanaannya masih dianggap masih perlu mendapat perhatian khusus.

Pemilihan subyek penelitian mendasarkan pada hakikat penelitian kualitatif, bahwa yang dipentingkan dalam pemilihan informan adalah kontekstualnya bukan besarnya populasi atau besarnya jumlah informan. Analisis data dilakukan selama proses pelaksanaan penelitian. Informasi yang diperoleh ditafsirkan terus menerus smabil merumuskan kesimpulan yang sifatnya sementara. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat kegiatan utama seperti yang disarankan oleh sugiyono (2010) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Visi, dan Misi Sekolah Berbasis Pelayanan Prima**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi tentang visi, misi dan tujuan sekolah, yakni pernyataannya sebagai berikut:

# “Manajemen keuangan di SMP Negeri 12 Surabaya, memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik”

Selanjutnya Kepala Sekolah mengatakan :

”Transparan berarti adanya keterbukaan. Di sekolah kami adanya keterbukaan dalam pengelolaan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Akuntabilitas berarti penggunaan uang sekolah kami dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan prinsip efektivitas, kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan yang terbaik daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Hal tersebut merupakan bagian dari visi dan misi sekolah”.

Berhubungan dengan visi, misi dan tujuan sekolah, peneliti mengamati langsung dan mengadakan wawancara dengan staf keuangan SMP Negeri 12 Surabaya, mereka mengatakan :

“Pelaksanaan visi, misi dan tujuan sekolah mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan. Mekanisme yang ditempuh di dalam pelaksanaan kegiatan harus benar, efektif dan efisien. Pembukuan uang yang masuk dan keluar dilakukan secara cermat dan transparan. Untuk itu tenaga yang melakukan pembukuan dipersyaratkan menguasai teknis pembukuan yang benar sehingga hasilnya bisa tepat dan akurat. Penggunaan anggaran memperhatikan asas umum pengeluaran negara, yaitu manfaat penggunaan uang negara. seperti prinsip efisien, pola hidup sederhana, dan sebagainya. Setiap melaksanakan kegiatan yang memberatkan anggaran belanja, ada ikatan-ikatan yang berupa: pembatasan-pembatasan, larangan-larangan penggunaan uang negara”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka pelayanan prima,Bendaharawan, yakni Ibu Dra. Ismi Rinarni mengatakan :

“Pelaksanaan pengeluaran anggaran di sekolah ini disesuaikan dengan sumbernya, yaitu dana rutin, BOS, Komite sekolah dan sebaginya. Sumber dana DIPA digunakan untuk: Penyelenggaraan Operasional Perkantoran, Perawatan Gedung Kantor, Perawatan Sarana Prasarana Kantor, Pembinaan Administrasi dan PengelolaanKeuangan, Penyusunan Program Kerja/Rencana Kerja, Beasiswa, dan Peningkatan SMP Negeri 12 Surabaya. Visi kami ingin melakukan pelayanan di bidang keuangan secara prima.”

Berdasarkan pengamatan peneliti dan keterangan Kepala Sekolah, bendaharawan sekolah dalam mengelola keuangan hendaknya memperhatikan: Hemat dan sesuai dengan kebutuhan, Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, dan Tidak diperkenankan untuk kebutuhan yang tidak menunjang proses belajar mengajar, seperti ucapan selamat, hadiah, pesta. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah menerapkan manajemen yang tertib meliputi tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib pengendalian dan pengawasan.

**Rentsra Sekolah Berbasis Pelayanan Prima**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi tentang persiapan penyusunan renstra yang berbasis pelayanan prima, yakni pernyataannya sebagai berikut:

“Melalui kegiatan supervisi kolegial maka diantara sesama warga sekolah bisa saling memberi dan menerima masukan untuk perbaikan kinerjanya. Maka dalam supervisi kolegial sifatnya kita saling membantu dan tidak perlu merasa rendah dan direndahkan. Demikian juga pada saat penyusunan renstra sekolah, kita bahas bersama, semua peserta : guru, kepala, dan karyawan bisa menyampaikan idenya dalam rangka tersusunnya renstra. Melalui kolegial kegiatan sekolah dapat direncanakan secara bersama, dibukukan secara transparan, secara efektif dan efisien. Restra sekolah merupakan dasar dan acuan semua kegiatan sekolah. Melalui renstra sekolah sangat diharapkan terwujudnya pelayanan prima bagi para pelanggan, baik internal maupun eksternal”

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendaharawan sekolah diperoleh informasi tentang persiapan penyusunan renstra sekolah, yakni pernyataannya sebagai berikut:

“Di dalam manajemen SMP Negeri 12 Surabaya, terdapat rangkaian aktivitas yang kami lakukan, yakni : perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Dengan demikian manajemen sekolah dilakukan rangkaian aktivitas mengatur kegiatan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah ”.

Selanjutnya dijelaskan oleh Dra. Libia Mufidah,M.Pd sebagai kepala sekolah, dengan pernyataannya sebagai berikut :

“Perencanaan renstra sekolah menekankan analisis program kegiatan sesuai visi, misi, tujuan sekolah, menentukan sumber dan jumlah anggaran, serta menentukan jumlah anggaran tiap kegiatan yang dilakukan dalam satu tahun. Pembukuan dilakukan oleh sekretaris dan bendaharawan secara cermat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembelanjaan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini bendaharawan hendaknya paham tentang tata cara belanja sehingga tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh pihak internal dan eksternal sekolah. Secara internal pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah. Selanjutnya pertanggung jawaban dilakukan sesuai dengan sumber anggaran dan pedoman yang berlaku”.

Berhubungan dengan perencanaan sekolah, peneliti mengamati langsung dan mengadakan wawancara dengan staf keuangan SMP Negeri 12 Surabaya mereka mengatakan :

“Renstra sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.”

Selanjutnya dikatakan oleh staf keuangan yang lain yakni Dra Ien Juniastuti mengatakan bahwa :

“Perencanaan keuangan juga dialokasikan untuk :penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi pelayanan yang bersifat teknis edukatif untuk proses belajar mengajar baik teori maupun praktek; dan kegiatan ekstra kurikuler; pengadaan dan perawatan buku pelajaran, peralatan pendidikan, alat pelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan dan peralatan praktek keterampilan; pengadaan dan perawatan sarana kegiatan penunjang seperti sarana administrasi, gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas sekolah dan lingkungan; penyediaan daya dan jasa seperti listrik, telepon, gas dan air; perjalanan dinas kepala sekolah dan guru; pelayanan kemasyarakatan, pemberdayaan Komite Sekolah, honorarium, lembur, transportasi, insentif dan lainnya yang menunjang pendidikan”.

Berdasarkan studi dokumen yang terdapat di SMP Negeri 12 Surabaya Penyusunan Renstra melalui proses yang partisipatif sebagai berikut :



**Gambar 1. Proses Partisipatif SMP Negeri 12 Surabaya**

Berdasarkan pengamatan peneliti dan Berdasarkan studi dokumen yang terdapat di SMP Ngeri 12 Surabaya Penyusunan RAPBS seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini:

**Tabel 1. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja SMP Negeri 12 Surabaya**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **RENCANA PENDAPATAN** | **JUMLAH(Rp)** | **No** | **RENCANA PENGELUARAN** | **JUMLAH(Rp)** |
| 1 | Saldo Tahun Lalu | ………….. | 1 | Gaji guru dan pegawai | …………….. |
| 2 | Gaji guru dan pegawai | ………….. | 2 | Belanja Pemeliharaan | …………….. |
| 3 | UUDP | ………….. | 3 | Belanja Daya | ………….. |
| 4 | BOS | ………….. | 4 | Belanja Barang | ………….. |
| 5 | Bantuan  Pemerintah Insidental |  | 5 | Pengembangan Program Unggulan | ………….. |
| 6 | Dana Pengembangan Pendidikan | ………….. | 6 | KBM/Peningkatan Mutu | ………….. |
| 7 | Dana Swadaya Masyarakat | ………….. | 7 | Kesiswaan | ………….. |
| 8 | Sumber Lain: |  | 8 | Administrasi | ………….. |
|  | a. Hasil usaha kantin sekolah | ………….. | 9 | Sarana Prasarana | ………….. |
|  | b. Sumbangan tidak mengikat/ Sodakoh | ………….. | 10 | Kegiatan Perjalanan Dinas |  |
|  | ………………. | ………….. | 11 | Koordinasi dengan Instansi Lain | ………….. |
|  |  |  | 12 | Insentif Guru dan pegawai | ………….. |
|  |  |  | 13 | Biaya operasional Komite sekolah | ………….. |
|  |  |  | 14 | Evaluasi | ………….. |
|  |  |  | 15 | Perpustakaan | ………….. |
|  |  |  | 16 | Kegiatan Akhir Tahun dan pelepasan siswa kelas VI | ………….. |
|  | **Jumlah Keseluruhan** | ……………… |  | **Jumlah Keseluruhan** | ………………. |

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendaharawan sekolah diperoleh informasi tentang Sumber-sumber pendapatan sekolah, yakni pernyataannya sebagai berikut

“Sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan sekolah antara lain : (1) pengelolaan kantin sekolah, (2) pengelolaan koperasi sekolah. Berdasarkan pemaparan data di atas, maka temuan dari penelitian tentang penyusunan renstra berbasis supervisi kolegial sebagai berikut :

1. Kepala SMP Negeri 12 Surabaya sebagai supervisor, memiliki beberapa kompetensi dasar yang sangat dikuasai, yaitu: (a) memahami kurikulum sekolah; (b) membantu melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang terdapat di kelas; (c) mengadakan hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, khususnya dengan komite dan para orang tua murid, (d) mampu menciptakan hubungan baik dengan murid dan guru di sekolahnya, (e) mampu mengelola sarana dan fasilitas sekolah, dan (f) mampu melaksanakan program-program kerja dan pengajaran. Beliau sebagai pimpinan yang memiliki kemampuan tersebut, dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh para guru dan kepala sekolah, Salah satu faktor yang berperan penting di SMP Negeri 12 Surabaya adalah peran pokok yang dimainkan oleh kepala kepala sekolah melalui kepemimpinan dengan membangun dan mempertahankan semangat kerja yang positif dan tinggi, kepala sekolah ini telah menjalankan kepemimpinan yang mampu menciptakan semangat kerja guru yang tinggi. Semangat guru yang tinggi itu tentunya dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi sekolah.
3. Dalam upaya mengembang visi dan misi SMP Negeri 12 Surabaya dan restra sekolah yang telah ditetapkan dan agar kebijakan serta strategi sejauh mungkin akurat, maka dilakukan analisis strategis. Dalam analisis ini terdiri dari (1) Kekuatan lingkungan internal, (2) Keterbatasan lingkungan internal, (3) Peluang lingkungan eksternal, dan (4) Tantangan lingkungan eksternal.
4. Dalam penyusunan renstra SMP Negeri 12 Surabaya didahului dengan penyusunan analisis SWOT. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan wakasek humas, bahwa Sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan renstra, sekolah melakukan : (1) menyusun progran dengan analisis *Strength, Weaknesess, Opportunities, Threats* (SWOT), (2) berusaha memiliki Kredibilitas, Akseptabilitas, Moralitas, dan Integritas (KAMI), (3) mempelajari prinsip-prinsip kepemimpinan, (4) menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, dan (5) belajar dari umpan balik.
5. Visi, misi dan tujuan merupakan titik sentral dalam siklus perencanaan pengembangan sekolah. Ketiganya mensarikan apa yang menjadi dasar keberadaan sekolah dan apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Oleh karena itu, ketiganya menjadi kerangka acuan untuk menciptakan pelayanan prima. Dari semua langkah dalam siklus perencanaan dan berfungsi sebagai (1) konteks saat melakukan telaah, (2) arah dari rancangan dan implementasi, dan (3) tolak ukur dalam proses telaah. Semua kegiatan sekolah menyangkut: kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan lain lain selalu mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah yang telah disepakati dan dilaksanakan , bahkan dibela bersama.
6. Renstra SMP Negeri 12 Surabaya disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitan tentang implementasi kebijakan kepemimpinan sekolah sebagai organisasi belajar efektif berbasis layanan prima di SMP Negeri 12 Surabaya dapat disimpulkan Kepala SMP Negeri 12 Surabaya adalah sebagai supervisor, memiliki beberapa kompetensi dasar yang sanga dikuasai, yaitu: (a) memahami kurikulum sekolah; (b) membantu melaksanakan kegiatan belajar-mengajar yang terdapat di kelas; (c) mengadakan hubungan dengan masyarakat di sekitarnya, khususnya dengan komite dan para orang tua murid, (d) mampu menciptakan hubungan baik dengan murid dan guru di sekolahnya, (e) mampu mengelola sarana dan fasilitas sekolah, dan (f) mampu melaksanakan program-program kerja dan pengajaran. Beliau sebagai pimpinan yang memiliki kemampuan tersebut, dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh para guru dan kepala sekolah, Salah satu faktor yang berperan penting di SMP Negeri 12 Surabaya.adalah peran pokok yang dimainkan oleh kepala kepala sekolah melalui kepemimpinan dengan membangun dan mempertahankan semangat kerja yang positif dan tinggi, kepala sekolah ini telah menjalankan kepemimpinan yang mampu menciptakan semangat kerja guru yang tinggi. Semangat guru yang tinggi itu tentunya dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya tujuan organisasi sekolah. Visi, misi dan tujuan merupakan titik sentral dalam siklus perencanaan pengembangan sekolah. Ketiganya mensarikan apa yang menjadi dasar keberadaan sekolah dan apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Oleh karena itu, ketiganya menjadi kerangka acuan untuk menciptakan pelayanan prima. Dari semua langkah dalam siklus perencanaan dan berfungsi sebagai (1) konteks saat melakukan telaah, (2) arah dari rancangan dan implementasi, dan (3) tolak ukur dalam proses telaah. Semua kegiatan sekolah menyangkut: kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, sumber daya manusia dan lain lain selalu mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah yang telah disepakati dan dilaksanakan, bahkan dibela bersama.

Renstra SMP Negeri 12 Surabaya disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan, baik pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengembangan jangka pendek berupa pengembangan satu tahunan. Pengembangan jangka panjang berupa pengembangan lima tahunan, sepuluh tahunan, bahkan dua puluh lima tahunan. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam upaya mengemban visi dan misi SMP Negeri 12 Surabaya dan renstra sekolah yang telah ditetapkan dan agar kebijakan serta strategi sejauh mungkin akurat, maka dilakukan analisis strategis. Dalam analisis ini terdiri dari (1) Kekuatan lingkungan internal, (2) Keterbatasan lingkungan internal, (3) Peluang lingkungan eksternal, dan (4) Tantangan lingkungan eksternal. Dalam penyusunan renstra SMP Negeri 12 Surabaya didahului dengan penyusunan analisis SWOT. Hal ini seuai dengan yang dikatakan wakasek humas , bahwa Sehubungan dengan penyusunan dan pelaksanaan renstra , sekolah melakukan : (1) menyusun progran dengan analisis *Strength, Weaknesess, Opportunities, Threats* (SWOT), (2) berusaha memiliki Kredibilitas, Akseptabilitas, Moralitas, dan Integritas (KAMI), (3) mempelajari prinsip-prinsip kepemimpinan, (4) menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, dan (5) belajar dari umpan balik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Mangkoesoebroto, G. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta

Rahardjo, Susilo dan Gudnanto.2011.*Pemahaman Individu Tehnik Non Tes*. Kudus : Nora Media Enterprise

Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung : Alfabeta

Noor, S.M.2012. Pengakuan Negara Baru (Teori-teori Pengakuan). Diakses November 2012. <http://www.negarahukum.com/hokum/pengakuan-negara-baru-teori-teori-pengakuan.html>

**ANALISIS *RATIO LIKUIDITAS*, *RATIO SOLVABILITAS* DAN *RATIO RENTABILITAS* TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA KPRI BHAKTI PERTIWI LAMONGAN**

**Evi Yulia\*)**

\*)Program studi ekonomi manajemen Universitas Islam Lamongan

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui peranan *ratio likuiditas* terhadap pemberian kredit modal kerja pada KPRI Bhakti Pertiwi, kedua, untuk mengetahui peranan *ratio solvabilitas* terhadap pemberian kredit modal kerja pada KPRI Bhakti Pertiwi, ketiga, untuk mengetahui peranan *ratio rentabilitas* terhadap pemberian kredit modal kerja pada KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat analisis laporan keuangan yaitu ratio keuangan yang terdiri dari pertama *ratio likuiditas* menggunakan *current ratio, quick ratio, cash ratio*. Kedua *ratio solvabilitas* menggunakan *total debt to capital assets ratio* dan *total debt to equty ratio*. Ketiga ratio profitabilitas menggunakan *net profit margin*, *ROE* dan *ROI*.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan ratio keuangan diperoleh hasil pertama, *rasio likuiditas*, *current ratio* menunjukkan angka 191persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan *likuid* karena berada diatas standart yang ditetapkan yaitu 175 persen. , untuk *quick ratio* menunjukkan angka 152 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan *likuid* karena berada diatas standart yang ditetapkan yaitu 100 persen. , untuk *cash ratio* menunjukkan angka 67 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan *likuid* karena berada diatas standart yang ditetapkan yaitu 15 persen. Kedua, *Total debt to equity ratio* menunjukkan angka 40 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan *solvable* karena berada dibawah standart yang ditetapkan yaitu kurang dari 60 persen. *Total debt to capital* assets ratio menunjukkan angka 29 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan s*olvable* karena berada dibawah standart yang ditetapkan yaitu kurang dari 60 persen. Ketiga, *net profit margin* menunjukkan angka 16 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan *profit* karena berada diatas standart yang ditetapkan yaitu 15 persen*. ROE* menunjukkan angka 13 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan *profit* karena berada diatas standart yang ditetapkan yaitu 10 persen. *ROI* menunjukkan angka 9 persen yang berarti bahwa kinerja keuangan perusahaan dikatakan kurang *profit* karena berada dibawah standart yang ditetapkan yaitu 30 persen.

**Kata kunci**: *Ratio likuiditas, ratio solvabilitas, ratio Rentabilitas,*  kredit modal kerja

**PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 , koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar asas kekeluargaan. selain itu koperasi juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang ikut serta membangun perekonomian negara dan membantu mengembangkan perekonomian Indonesia. selain itu Koperasi sebagai wadah perekonomian ikut membantu menyalurkan aspirasi masyarakat , hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jenis koperasi yang didirikan di Indonesia sehingga dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk memutuskan suatu badan usaha, organisasi atau perusahaan memiliki kualitas yang baik dan kinerja yang bagus maka ada dua cara untuk melihat kondisi tersebut yaitu dengan melakukan penilaian pada sisi keuangan dan non keuangan. pada sisi keuangan yang perlu diperhatikan adalah laporan keuangan perusahan atau badan usaha yang bersangkutan yaitu melihat pada sisi laporan rugi laba dan neraca . Dengan melakukan analisis laporan keuangan mak akan diketahui gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan.

Ada beberapa analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu badan usaha atau perusahaan dan memberikan gambaran atau pandangan tentang kondisi keuangan tersebut yaitu dengan menggunakan analissi rasio keuangan. Rasio keuangan yang bisa digunakan adalah rasio *Likuiditas*, *Solvabilitas,,* dan Rasio *Rentabilitas* atau biasa disebut *Profitabilitas*

Koperasi harus mampu mengukur seberapa besar tingkat *likuiditas, solvabilitas* dan *profitabilitas* yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha tertentu untuk mengetahui seberapa baik dan bagus kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dengan mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka perlu dilakukan analisis rasio *likuiditas*, dengan mengetahui seberapa mampu perusahaan mengembalikan kewajiban jangka pendek maupun panjang perlu dilakukan analisis *solvabilita*s, dan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang dimiliki oleh perusahan prlu dilakukan analisis *profitabilitas*.

Dengan mengetahui hasil dari analisis rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas Hal ini dapat membantu pihak koperasi dalam menentukan dan mempertimbangkan layak atau tidaknya perusahaan (debitor) menerima pinjaman kredit modal kerja. Jika kondisi keuangannya baik maka perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank, tapi jika kondisi keuangannya tidak baik maka perusaan tidak layak mendapat pinjaman kredit modal kerja.

Dengan mengetahui standart yang ditetapkan oleh koperasi tentang standart rasio keuaangan maka dapat dihitung besarnya rasio likuiditas yang terdiri dari *cuuret ratio, quick ratio, dan cash ratio*. Kemuidian *rasio solvabilitas* yang terdiri dari rasio *total debt to assets ratio dan total debt to equity ratio*

Mengingat begitu pentingnya laporan keuangan dalam menentukan kondisi keuangan koperasi dan penentuan layak atau tidaknya pemberian kredit modal kerja maka peneliti tertarik mengambil judul “ **ANALISIS *RATIO LIKUIDITAS, RATIO SOLVABILITAS DAN RATIO RENTABILITAS* TERHADAP PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA KPRI BHAKTI PERTIWI LAMONGAN.**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah(a)Bagaimanakah peranan KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *likuiditas* tahun 2016 ? (b) Bagaimanakah peranan KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *Solvabilitas* tahun 2016 ? (c) Bagaimanakah peranan KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *rentabilitas* tahun 2016 ?

Tujuan dari penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui peranan KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *likuiditas* tahun 2016. (b) untuk mengetahui peranan KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *Solvabilitas* tahun 2016. (c) untuk mengetahui peranan KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *rentabilitas* tahun 2016.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan antara lain (a) Secara akademis, Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan refrensi bagi penulis berikutnya dan dapat digunakan sebagai landasan perumusan masalah bagi peneliti yang mengadakan riset dalam kinerja keuangan, mengembangkan lebih dalam tentang rasio keuangan sehingga lebih mempermudah pembaca dalam melakukan riset-riset keuangan.(b) Bagi Koperasi, Dengan diterapkan analisis rasio keuangan diharapkan dapat membantu memberikan saran kepada pimpinan koperasi dalam mengambil keputusan agar tercapai tujuan koperasi, selain itu bisa dijadikan sebagai alat evaluasi untuk melangkah ke depan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang akan diderita, karena koperasi tidak hanya bergerak dalam bidang usaha saja tapi ada juga yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membantu manajer dalam mempertimbangkan layak atau tidaknya pemebrian kredit kepada karyawan atau perusahaan lain.(c) Bagi Peneliti, Dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keuangan, dengan adanya penelitian ini maka peneliti dapat mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan. hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melihat kondisi keuangan perusahaan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu (d) Bagi Masyarakat, Dapat digunakan sebagai media aplikasi dan informasi agar masyarakat lebih teliti, jeli dalam mengajukan kredit pada lembaga keuangan khususnya koperasi dan menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.

Untuk memutuskan suatu badan usaha atau perusahaan memiliki kualitas yang baik maka ada dua acuan untuk melihat badan usaha atau perusahaan tersebut telah menjalankan suatu kaidah- kaidah manajemen yang baik. Penilaian ini dapat dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan (Fahmi 2012 : 2).

Rasio keuangan atau *financial ratio* sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menegah pada umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek dan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden yang memadai. informasi tersebut dapat diketahui dengan cara menghitung rasio keuangan perusahaan. Secara jangka panjang rasio keuangan juga dipakai dan dijadikan sebagai acuan dalam menganlisis kondisi kinerja suatu perusahaan misalnya kondisi kinerja perusahaan selama 12 tahun untuk kemudian diprediksi selama 10 sampai 12 tahun kedepan namun analisa seperti ini jarang dilakukan (Fahmi, 2012 :44)

Suatu laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan , apabila dengan informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksikan apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses perbandingan evaluasi dan analisis tren, akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa mendatang (Fahmi, 2012 : 22). Menurut Fahmi laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan

Menurut Harahap (2009:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Munawir (2010:05) pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan / menggambarkan jumlah asset, kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. sedangkan perhitungan (laporan) Laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009 : 2) Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya : sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral ari laporan keuangan. Di samping itu juga ternasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal : informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut ikatan akuntansi Indonesia dalam bukunya “standart akuntansi keuangan” (2009 : 3) menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan antara lain adalah (a) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. (b) Laporan keuangan yang menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggung jawaban manajemen atas, sumberdaya yang di percayakan kepadanya

Menurut standar Akuntansi Keuangan PSAK No 31, bahwa standar khusus akuntansi mengenai karakteristik laporan keuangan koperasi sebagai berikut (a) Laporan keuangan biasanya meliputi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan perhitungan rugi laba dan laporan perubahan posisi keuangan yang penyajianya dilakukan secara komparatif. (b) Sesuai dengan posisi koperasi sebagai bagian dari sistem jaringan koperasi beberapa pos atau istilah yang sama atau muncul, baik pada kelompok aktiva maupun pada kewajiban dan kekayaan bersih. (c) Perhitungan rugi atau laba menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha (SHU). (d) Dengan adanya konsep sistem jaringan koperasi dan peraturan pemerintah, makaA terdapat aktiva yang dimiliki koperasi tetapi tidak dikuasainya dan sebaliknya terdapat aktiva yang dikuasai oleh koperasi tetapi tidak dimilikinya. (e) Laporan keuangan koperasi bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi dari koperasi.

Menurut Bashwir (2012 : 187) laporan keuangan kopersi yang umum disajikan adalah laporan keuangan sisa hasil usaha (SHU koperasi) dan neraca. Laporan SHU menggambarkan hasil usaha yang dicapai koperasi dalam satu periode operasi

Komponen dasar yang terdapat dalam, setiap laporan keuangan adalah perhitungan rugi laba dan laporan perhitungan hasil usaha, neraca, laporan perubahan posisi keuangan. Menurut Munawir, (2010: 25) masing-masing komponen dari laporan keuangan dapat dilihat berikut ini (a) Laporan Rugi Laba, (b) neraca.

Menurut Munawir (2010:26), laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi meringkaskan hasil dari kegiatan perusahaan selam periode akuntansi tertentu, laporan ini sering dipandang sebagai laporan akuntansi yang paling penting dalam laporan tahunan.

Adapun bagian atau komponen-komponen dari laporan rugi laba adalah sebagai berikut (Hanafi, 2012:142) adalah (a) Penjualan (*sales*) Yaitu pendapatan yang diperoleh perusahaan akibat dari penyerahan barang atau jasa dari bisnis utamanya.. (b) Harga pokok penjualan (*Cost ofgoods sold*) Harga pokok penjualan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual.(c) Laba Kotor/Bruto (*Gross Profit*) Laba kotor merupakan selisih antara penjualan bersih (*not sales*) dengan harga pokok penjualan (*Cost Of Goods Sold*) laba kotor menunjukkan besar laba rugi yang dialami dengan membuat produk atau menyediakan jasa. (d) Biaya operasional (*Operating Expensesz*) Biaya operasional atau biaya usaha adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dari produk perusahaan, tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari. (e) Laba Bersih (*Net Profit*) Laba bersih diperoleh dengan mengurangi laba operasional dengan biaya lain-lain (bila terdapat biaya lain-lain yang harus dikeluarkan perusahaan) atau dengan menambah laba operasional dengan pendapatan lain-lain (bila terdapat penambahan pendapatan lain-lain).

Menurut Kasmir (2012:30), neraca adalah salah satu laporan keuangan yang terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu setiap perusahaan diharuskan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk neraca, neraca biasanya disusun pada periode tertentu, misalnya satu tahun. Namun, neraca juga dapat dibuat pada saat tertentu untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini bila diperlukan biasanya hal ini sering dilakukan pihak manajemen pada saat tertentu.

Menurut James C Van Home (2013:154), neraca adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total *ekuitas* pemilik.

Komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi kedalam tiga menurut Fahmi (2012: 24) yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva lainya

kewajiban dibagi kedalam dua jenis yaitu kewajiban lancar (utang jangka pendek) dan utang jangka panjang dan komponen modal terdiri dari modal setor dan labs yang ditahan. Posisi aktiva pada neraca disajikan pada sisi kanan secara berurutan dari atas kebawah neraca berbentuk skontro (*account form*) sementara itu untuk neraca yang berbentuk laporan (*report form*) penyusunanya dimulai dari atas secara berurutan kebawah.(Fahmi, 2012 : 24)

Menurut standart akuntansi keuangan (2010 : 15) menjelaskan neraca menyajikan *asset*, kewajiban, dan ekuitas suatu *entitas* pada suatu tanggal tertentu sampai periode pelaporan. neraca minimal mencangkup pos-pos sebagai berikut (a) Kas dan setara kas, (b)Piutang usaha dan piutang lainnya, (c) persediaan, (d) property investasi, (e) *asset* tetap, (f) *asset* tidak berwujud, (g) utang usaha dan utang lainnya, (h )*asset* dan kewajiban pajak, (i) kewajiban, (j) *ekuitas*

Menurut Fahmi (2012 : 2) Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Menurut Fahmi (2012 : 3) ada 5 tahap dalam menganalisakinerja keuangan suatu perushaan secara umum yaitu (1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan (2)Melakukan perhitungan , (3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh, (4) Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan (5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ditemukan

Menurut Munawir (2007 : 64), mendefinisikan “Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa, berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila rasio angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar”.

Menurut James C van horne, (2013:163) analisis rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh denngan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. dari hasil rasio keuangan akan terlihat kondisi kesehatan perushaan yang bersangkutan.

Menurut Fahmi (2012 : 47) manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu (1) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan (2) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan (3) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari *perspektif* keuangan. (4) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi para kreditor untuk memperkirakan potensi resioko yang akan dihadapai dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.

*Rasio Likuiditas* merupakan rasio yang diperlukan dalam menganalisa laporan keuangan perusahaan, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi perusahaihan misal membayar listrik, gaji karyawan, gaji lembur, tagihan telepon, dan sebagainya (Fahmi 2012 : 59).

Menurut pendapat Munawir (2007 : 31), mendefinisikan” *Likuiditas* adalah kemampuan suata perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.

Jenis-jenis rasio Likuiditas terdiri dari tiga alat ukur, yaitu (1)*Current Ratio,(2)Quick Ratio atau Acid Test Ratio, (3)Cash Ratio*

Menurut Kashmir (2012: 133) Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajban jangka pendek atau utang yang egera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Aktiva lancar merupakan harta perusahaan yang dapat dijadikan uang dalam waktu singkat (maksimal satu tahun).

Komponen aktiva lancar meliputi kas, bank, surat-surat berharga, piutang , persediaan, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, pinjaman yang diberikan dan aktiva lancar lainnya

Komponen utang lancar terdiri dari utang dagang, utang bank satu tahun, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang *deviden*. biaya diterima dimuka, utang jangka panjang yang sudah hampir jatuh tempo, serta utang jangka pendek lainnya

Rumus untuk menghitung *current ratio* :

*Current Ratio* = x 100%

*Current Ratio* yang tinggi belum tentu dapat menjamin terbayarnya utang yang jatuh tempo. Hal ini dikarenakan adanya jumlah persediaan yang relatif besar jika dibandingkan dengan tingkat penjualan, sehingga perputaran persediaan rendah, atau dapat juga dimungkinkan oleh jumlah piutang yang besar dan sulit ditagih. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi tahun 2002, *Current Ratio* yang baik adalah sebesar 175% - 200%.

Menurut Bambang riyanti (2001 : 27) mengatakan apabila suatu perusahaan menentapkan bahwa current ratio yang harus diperhatikan adalah 3 : 1 atau 300 % ini berarti bahwa setiap utang lancar sebesar Rp 1,00 harus dijamin dengan aktiva lancar RP 3,00 atau dijamin dengan net working capital sebesar 3,00

*Quick Ratio* Rasio ini disebut juga *acid test rasio* yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. menurut Fahmi (2009 : 61) persediaan terdiri dari persediaan alat-alat kantor , bahan baku, persediaan dalam proses dan persediaan barang jadi.

Menurut Prastowo (2011 : 85) persediaan tidak bisa sepenuhnya diandalkan karena persediaan bukanlah kas yang bisa segera diperoleh dan bahkan mungkin dijual pada kondisi ekonomi yang lesu Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar.

Menurut Bambang riyanto (2001 :27) *Quick ratio* yang < dari 100 % dianggap kurang baik. *Quick ratio* dapat dihitung dengan formula

*Quick Ratio* = x 100%

Rasio ini menunjukkan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar semakin besar rasio ini semakin baik

*Cash Ratio*, Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemapuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Berdasarkan surat keputusan mentri koperasi bahwa standart yang ditetapkan untuk Cash ratio adalah 10 % - 15 %

*Cash Ratio* dapat dihitung dengan formula

:

|  |
| --- |
|  |

*Cash Ratio* = x 100%

Kemampuan untuk membayar hutang yang segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang diuangkan

Nilai ideal dari ketiga analisa rasio *likuiditas* ini ini adalah minimum sebesar 175%, semakin besar adalah semakin baik dan perusahaan dalam kondisi sehat.(surat keputusan mentri koperasi tahun 2002)

Rasio *Solvabilitas*, perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi ideal, apabila perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*Likuid*) dan juga dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya (*Solvable*). Rasio s*olvabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan dilikuidasi, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang (Munawir:2001).

Menurut Kashmir (2012: 150) Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasikan)

Menurut departemen koperasi, s*olvabilitas* adalah keadaan keuangan koperasi pada suatu saat menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kemampuan koperasi untuk membayar semua hutangnya jangka pendek maupun jangka panjang.

Suatu perusahaan yang *solvable* berarti perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya disebut perusahaan yang *insolvable*.

*Total Debt to Capital Asset Ratio*, menurut Munawir (2008 : 88) *Total Debt to Capital assets* *ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ativa, dengan kata lain seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva

Rumus untuk menghitung *Total Debt to capital Assets Ratio adalah*

*Total debt to capital asseta ratio =* x100 %

Rasio yang rendah menunjukkan adanya pinjaman yang besar. Menurut Samuel (2001 :220) *Total Debt to capital assets Ratio* yang lewat dari 66 % dianggap beresiko%. Rasio hutang atas aktiva dikatakan baik jika porsi hutang terhadap aktiva harus lebih kecil dengan standart solvabilitas yang digunakan yaitu < 66%.

*Total debt to equity ratio* merupakan perbandingan antara total hutang dan modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada.

Rasio hutang modal menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar dan merupakan rasio yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai dari hutang. Rasio ini disebut juga rasio *leverage*.

Untuk menghitung *debt to equity ratio* bisa menggunakan rumus sebagai beriku :

*Total debt to equty atio =* x100 %

Semakin kecil rasio hutang modal  maka semakin baik dan untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama. Rasio utang atas modal dikatakan baik jika semakin kecil rasio semakin baik. maksudnya jika kurang dari 1 maka rasio atas modal semakin baik (Kashmir , 2012 : 158)

Semakin tinggi nilai persentase Rasio *Solvabilitas* ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini dianggap beresioko apabila lewat dari 66 %, sehingga standart yang ditetapkan adalah < 66% (Samuel 2001 : 220)

Rasio rentabilitas menunjukkan kemampuan perusahaa untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (Munawir: 2001 :86). Selanjutnya analisis rentabilitas dapat diartikan sebagai hasil yang menunjukkan berapa besar kontribusi laba dari modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pengertian *Return on Equity* (*ROE*), Menurut Prastowo (2011 :92-93) Rasio untuk mengukur kemampuan *equity* untuk menghasilkan pendapatan bersih. Rasio ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat demikian pula sebaliknya dan dengan. Berdasarkan surat keputusan mentri koperasi tahun 2002 standart profitabilitas yang digunakan yaitu 10 % maka dikatakan baik.

Rumus menghitung *Return on Equity* *(ROE*):

*ROE =* x100 %

Pengertian *Return on Investment, m*enurut Prastowo (2011 :90 – 91 ) Rasio ini menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan *. ROI* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelolah investasinya. Semakin kecil rasio ini semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi koperasi tersebut. Menurut Munawir (1997 : 91) standart *ROI* yang ditetapkan yaitu 30%*..* Rumus yang digunakan untuk menghitung ROI

*ROI =* x100 %

*Net Profit Margin* Adalah Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mesndapatkan laba bersih dari penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih koperasi atas penjualan. Semakin besar rasio ini maka semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Berdasarkan surat keputusan mentri koperasi tahun 2002 standart profitabilitas yang digunakan yaitu 15 % maka dikatakan baik. Dan menurut munawir (1997 : 91) juga menetapkan 15%*.* Rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin* adalah.

*Net profit margin =* x100 %

Dibawah ini adalah rasio strandar yang ditetapkan oleh koperasi untuk melakukan analisis kelayakan menggunakan rasio keuangan , sebelum memutuskan memberikan kredit modal kerja kepada perusahaan. Jika hasil analisis sesuai dengan strandart yang ditetapkan makan perusahaan layak mendapat pinjaman tapi jika hasil analisis menunjukkan sebaliknya yaitu berada dibawah standart yang ditetapkan maka perusahaan kurang atau tidak layak mendapat pinjaman dari KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan, sehingga alat analisis ini sangat membantu koperasi dalam menentukan kondisi keuangan perusahaan sebelum perusahaan memutuskan memberikan pinjaman.

**Tabel 1. Rasio Standar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rasio** | **Ket** | **Standar** | **Kriteria** | **Ket** |
| **Rasio Likuiditas** | *Current ratio* | 175 % | likuid | Surat kep mentri koperasi |
| *Quick ratio* | 100% | Likuid | Bambang Riyanto |
| *Cash ratio* | 10 % - 15 % | Likuid | Surat kep mentri koperasi |
| **Rasio Solvabilitas** | *Total debt to equity ratio* | < 66% | *Solvable* | Samuel C. Weaver |
| *Total debt to capital asset* | < 66% | *Solvable* | Samuel C. Weaver |
| **Rasio Rentabilitas** | *Net profit margin* | 15 % | Profit | Munawir |
| *Retrun on equty* | 10 % | Baik | Surat keputusan mentri koperasi |
| *Retrun on investment* | 30 % | Baik | Munawir |

Menurut Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998 pasal 21 ayat 11 tentang perubahan undang-undang no 7/1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan, itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya (Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2008 ; 97) dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa Latin kredit berarti " *credere* "artinya percaya. Maksud percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya pada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkannya akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu

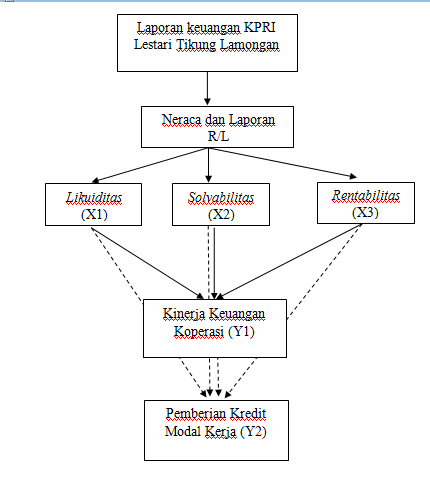
Dari penjelasan diatas dapatlah diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam fasilitas pemberian kredit menurut Firdaus dan Ariyanti ( 2009 : 3 ) adalah sebagai berikut (1) Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang, atatu jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan yang meminjamkan barang atau jasa disebut kreditur. (2) Adanya pihak yang membutuhkan atau meminjamkan uang , barang, atau jasa. pihak ini lazim disebut debitur (3) Kepercayaan, adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur (4) Kesepakatan, Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. (5) Jangka waktu, Setiap kredit yang diberikan memiliki janga waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah.(6) Resiko, Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko.kredit pada umumnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya, (7) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan sebutan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi di antara lain sebagai berikut dilihat dari segi kegunaan menurut Melayu S.P Hasibuan 2008 (a) Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik baru, atau untuk keperluan rehabilitasi.(b) Kredit modal kerja, Digunakan untuk keperluan meningkatkan kegiatan operasionalnya

Kredit modal kerja dilihat dari jangka waktu (a) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama I tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.(b) Kredit jangka menengah, Jangka waktu kreditnya berkisar antara I sampai 3 tabu, biasanya untuk investasi (c) Kredit jangka panjang, Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 sampai 5 tahun.

Kredit modal kerja dilihat dari segi jaminan (a) Kredit dengan jaminan, kredit yang digunakan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berujud atau barang tidak berwujud atau jaminan orang (b) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu kredit seperti ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah :



**Gambar 1. Kerangka Berfikir**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga bahwa KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan memiliki peranan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *likuiditas* tahun 2016. (b) diduga bahwa KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan memiliki peranan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *Solvabilitas* tahun 2016. (c) Diduga bahwa KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan memiliki peranan terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan menggunakan analisis rasio *rentabilitas* tahun 2016.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif.yaitu metode penelitian dengan cara analisa untuk mendiskripsikan (menggambarkan) data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

Menurut Sugiyono (2010;23) "Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan (skoring)". Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba untuk membuat pencandraan / gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu."

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah laporan keuangan perusahaan yang mengajukan kredit pada Kpri Bhakti Pertiwi Lamongan, ada banyak sekali perusahaan yang mengajukan kredit pada KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan tapi sampel yang diambil penulis yaitu tu perusahaan saja yaitu UD Sentosa Jaya**.**

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu data-data yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan perusahaan yang mengajukan kredit.yaitu data keuangan laporan laba rugi perusahaan dan neraca UD sentosa jaya

Data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pihak koperasi yakni KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pengajuan kredit modal kerja. Sedangkan data skunder diperoleh dari perusahaan yang mengajukan kredit kepada KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan berupa laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi dari perusahaan UD Sentosa Jaya selama tahun 2016

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pertama, dengan Wawancara tekhnik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang berwenang secara jelas dan terperinci segala informasi yang ada diperusahaan, kedua Observasi tekhnik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan sekaligus mencatat data yang diperoleh dari hasil penelitian. Ketiga Dokumentasi Teknik penggumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti dengan perantara suatu alas misalnya dengan menggunakan catatan atau arsip.

Dalam penelitian ini operasional variable terdiri dari tiga variable bebas yaitu rasio likuiditas (X1), rasio solvabilitas (X2) rasio profitabilitas (X3) dan keputusan pemberian kredit (Y) sebagai variable terikat

Untuk mengetahui apakah perusahaan layak mendapat pinjaman kredit atau tidak layak maka analisis yang dapat digunakan adalah rasio keuangan **yang** meliputi (a) *rasio likuidi*tas terdiri dari (1) *curret ratio*, (2) *quick ratio*, (3) *cash ratio*, (b) *Rasio Solvabilitas* terdiri dari (1) *Total debt to total assets ratio* (2) *Total debt to equity ratio*, (c) *ratio Rentabilitas* terdiri dari (1) *Net profit margin* , (2) *ROI* (3) *ROE*

**HASIL PEMBAHASAN**

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis rasio likuiditas untuk mengetahui layak atau tidaknya perusahaan mendapat pinjaman kredit modal kerja dari KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan adalah :

**Tabel 2. Perhitungan analisis rasio likuiditas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio *likuiditas* | Standart | hasil | keterangan |
| *Current ratio* | 175 % - 200% | 191% | Layak |
| *Quick ratio* | 100% | 152% | Layak |
| *Cash ratio* | 10 – 15% | 67% | Layak |

Berdasarkan hasil analisis menggunakan rasio *likuiditas current ratio* menunjukkan angka 191 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan likuid setiap 1 rupiah hutang lancer telah dijamin harta lancar sebesar 1.910 rupiah. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuid.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan rasio *likuiditas quick* *ratio* menunjukkan angka 152 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan likuid setiap 1 rupiah hutang lancar telah dijamin harta lancar sebesar 1.520 rupiah. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuid.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan rasio *likuiditas Casht ratio* menunjukkan angka 67 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan likuid setiap 1 rupiah hutang lancar telah dijamin harta lancar sebesar 6.700 rupiah. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuid

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis rasio Solvabilitas untuk mengetahui layak atau tidaknya perusahaan mendapat pinjaman kredit modal kerja dari KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan adalah

**Tabel 3. Hasil analisis rasio solvabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rasio *solvabilitas* | standart | Hasil | Keterangan |
| *Total debt to equity ratio* | < 66 % | 40 % | *Solvable* |
| *Total debt to capital asset* | < 66% | 29 % | *Solvable* |

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Total debt to equity ratio* menunjukkan angka sebesar 40 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan *solvable* dimana rasio standart yang ditetapkan Samuel C. Weaver yaitu < 66 %. Yang menggambarkan bahwa kemampuan modal sendiri sangat bagus untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. semakin kecil nilai *Total debt to equity ratio* semakin baik pula kondisi keuangan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan solvable

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *Total debt to capital asset* menunjukkan angka sebesar 29 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan *solvable* dimana rasio standart yang ditetapkan Samuel C. Weaver yaitu < 66 %. Yang menggambarkan bahwa kemampuan harta atau aktiva yang dimiliki perusahaan sangat bagus untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. semakin kecil nilai *Total debt to capital asset* semakin baik pula kondisi keuangan perusahaan. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan solvable

Dari hasil perhitungan menggunakan analisis rasio rentabilitas untuk mengetahui layak atau tidaknya perusahaan mendapat pinjaman kredit modal kerja dari KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan adalah

**Tabel 4. Hasil analisis rasio *Rentabilitas***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Rasio profitabilitas* | Standart | hasil | keterangan |
| *Net profit margin* | 15% | 16% | *Profit* |
| *ROE* | 10% | 13% | *Profit* |
| *ROI* | 30% | 9% | Cukup *profit* |

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *net profit margin* menunjukkan angka sebesar 16 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan *profit*. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan profit

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *ROE* menunjukkan angka sebesar 13 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan *profit*. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan profit

Berdasarkan hasil analisis menggunakan *ROI* menunjukkan angka sebesar 9 % yang berarti bahwa kinerja keuangan UD Sentosa Jaya dikatakan cukup *profit*. Hal ini berarti perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari bank karena memiliki kinerja keuangan yang baik dan cukup profit

Tabel 5. **Hasil analisa rasio *likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rasio |  | Standart | hasil | Ket |
| *Rasio likuiditas* | *Current ratio* | 175 % - 200% | 191% | Layak |
| *Quick ratio* | 100% | 152% | Layak |
| *Cash ratio* | 10 – 15% | 67% | Layak |
| *Rasio solvabilitas* | *Total debt to equity ratio* | < 66 % | 40 % | Layak |
| *Total debt to capital asset* | < 66% | 29 % | Layak |
| *Rasio profitabilitas* | *Net profit margin* | 15% | 16% | Layak |
| *ROE* | 10% | 13% | Layak |
| *ROI* | 30% | 9% | Layak |

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Rasio *likuiditas* memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan pemberian kredit modal kerja yang akan diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitur. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan mendapat pinjaman dari koperasi . Dari hasil analisa menunjukkan angka current ratio 191 %, quick ratio 152 % dan cash ratio 67 %. Ketiga rasio tersebut menunjukkan hasil di atas standrt yang sudah ditetapkan, semakin tinggi nilai rasio semakin baik kinerja keuanagan suatu perusahaan sehingga pihak perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan (2) Rasio *Solvabilitas* memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan pemberian kredit modal kerja yang akan diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitur. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan mendapat pinjaman dari koperasi. Dari hasil analisa menunjukkan angka Total debt to equty ratio sebesar 40 % dan Total debt to capital asset sebesar 29% dimana standart yang ditetapkan <66, semakin kecil nilai rasio semaakin baik kinerja perusahaan. sehingga pihak perusahaan layak untuk mendapat pinjaman dari KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan. (3) Rasio *Rentabilitas* memiliki peranan yang sangat penting dalam penentuan pemberian kredit modal kerja yang akan diberikan oleh pihak kreditor kepada pihak debitur. Analisis ini dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya perusahaan mendapat pinjaman dari koperasi. Dari hasil analisa menunjukkan angka net profit margin sebesar 16 %, ROI sebesar 9 % dan ROE sebesar 13%. Berada diatas standart yang ditetapkan semakin besar nilai profitabilitas semakin baik kinerja perusahaan. sehingga pihak perusahaan layak untuk mendapat pinjaman KPRI Bhakti Pertiwi Lamongan

**Saran**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasaan maka penulis akan mencoba memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ddan peningkatan kualitas kinerja keuangan koperasi dan peningkatan kualitas terhadap pelaksanaan analisis laporan keuangan dalam pemberian kredit . Adapun yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan adalah (1) Perusahaan dapat menggunakan rasio likuiditas sebagai informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. (2) Perusahaan dapat menggunakan rasio *solvabilitas* sebagai informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. (3) Perusahaan dapat menggunakan rasio *rentabilitas* sebagai informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. (4) Perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan sebagai informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat diperoleh informasi lebih handal dalam mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan. (5) KPRI dapat berperan dalam memberikan kredit modal kerja kepada perusahaan menggunakan analisis rasio *likuiditas* untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada perusahaan. (6) KPRI dapat berperan dalam memberikan kredit modal kerja kepada perusahaan menggunakan analisis rasio *solvabilitas* untuk menentukan kelayakan pemberian kredit kepada perusahaan

**DAFTAR PUSTAKA**

Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan keuangan Perusahaan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Ahyarudin, Peranan Analisis Laporan Keungan dalam Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi kasus Keuangan di BPR Bank daerah),2014. UNISLA, Lamongan

Arikunto, Suharsini ,2010.Prosedur Metode Penelitian, Yogyyakarta

Bashwir Revrison.2012. Koperasi Indonesia. Cetakan keempat.BPFE,Yogyakarta

Fahmi Irham.2012. Analisis Kinerja Keuangan. Cetakan pertama, : Penerbit Alfabeta, Bandung

Farid Harianto, Siswanto Sudomo,1998.Perangkat dan Tekhnik Analisis Investasi di Pasar Modal, PT Bursa Efek Jakarta

Harahap Sofyan Syafri,1998, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Cetakan Pertama PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008.Standart Akuntansi Keuangan, PSAK no. 31, Salemba Empat, Jakarta

James C.Van Horne.2013.Manajemen Keuangan.Edisi ketiga belas,Salemba Empat, Jakarta

Kashmir.2012. Analsisis Laporan Keuangan.Cetakan kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Mamduh M.Hanafi, 2012.Analisis Laporan Keuangan.Edisi keempat cetakan kedua, Penerbit UPP STIMP YKPN, Yogyakarta

Munawir.2010.Analisis Laporan Keuangan, Edisi keempat Cetakan Keempat belas, Yogyakarta :Penerbit Libirty Yogyakarta

Mudzilatun Nisa’, Penilaian Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Analisis Ratio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas (Study Terhadap Koperasi lamongan), 2015.UNISLA, Lamongan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Prastowo Dwi Darminto.1994. Anlisis laporan Keuangan : Sebuah Usualan Pola Pengajaran. Jurnal Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Rifai, veithzal.2013.Commercial Bank Management, Yogyakarta : Erlangga

Riyanto, Bambang.2010.Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta : Badan Penerbit Gajah Mada

Samuel C. Weaver dan J. Fred Weston, 2001, Finance and Accounting for nonfinancial Managers, Memahami laporan keuangan dan Akuntansi Sekelas MB, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.(terjemahan)

Subanar Harimurti.2001.Manajemen Usaha Kecil.Edisi Pertama Cetakan Keempat. Yogyakarta : Penerbit BPFE Yogyakarta

**PERANAN SEKTOR POTENSIAL DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN**

***(Studi Kasus Wilayah Di Kabupaten Lamongan)***

**Laily Chodariyantia Abid Muhtaromb**

Fakultas ekonomi, Universitas Islam Lamongan,

Email: [lailychodariyanti@unisla.ac.id](mailto:lailychodariyanti@unisla.ac.id) dan [abid@unisla.ac.id](mailto:abid@unisla.ac.id)

**ABSTRAK**

Potensi ekonomi dapat dianalisis dengan menentukan basis ekonomi. Basis ekonomi akan di lihat melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang mana lebih diprioritaskan sebagai penggerak utama perekonomian. Ini merupakan awal untuk menghasilkan kebijakan untuk dasar yang akan diterapkan oleh otoritas pembangunan di daerah. Kebijakan yang kurang tepat karena analisis basis ekonomi yang meleset dapat menjadi penghancur, bukan memperbaiki kondisi ekonomi suatu daerah justru akan menghambat laju pembangunan daerah tersebut. Diharapkan kebijakan dasar ini akan mempunyai daya dukung yang besar bagi perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah non prioritas.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif komparatif. penelitian ini adalah PDRB Sektoral Kabupaten Lamongan yang dihitung berdasarkan harga konstan. Untuk melihat terjadinya perubahan struktur perekonomian (*economic landscape*) digunakan *Multiplier Product Matrix* (MPM) dengan model data *Input-output.*

Peran sektor-sektor ekonomi dan sektor unggulan (*key sector*) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan yaitu telah terjadi pergeseran sektor unggulan, sebagaimana telah terlihat dalam perubahan urutan sektor unggulan. Keterkaitan Kabupaten Lamongan dengan Daerah-daerah Sekitarnya sehinnga menunjang pertumbuhan perekonomian, hal ini dapat diketahui bahwa kabuapten yang memiliki potesi kuat terhadap Kabupaten Lamongan adalah Kabupaten Gresik. Perubahan kontribusi output sektor ekonomi, perubahan sektor unggulan dan keterkaitan antar sektor ekonomi.

Kata kunci: ***Sektor Potensial, Perubahan Struktur Ekonomi Dan Pembangunan Sektoral, Kabupaten Lamongan.***

**LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan wilayah dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Pembangunan pada intinya adalah perombakan dalam struktur perimbangan ekonomi yang ada pada masyarakat sehingga membawa kemajuan dalam arti meningkatkan taraf hidup maupun penyempurnaan mutu kehidupan dalam masyarakat yang bersangkutan (Sukirno, 2006: 13). Pembangunan merupakan pola usaha-usaha perubahan menuju keadaan yang lebih baik dan dilakukan secara terus-menerus, oleh karena itu pembangunan mengandung konsep dinamis bukan statis.

Perwilayahan pembangunan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan sebagai usaha membagi wilayah nasional menjadi wilayah-wilayah regional. Dengan adanya konsep perwilayahan pembangunan tersebut, sedikit banyak telah mendorong penyebaran kegiatan pembangunan ke seluruh wilayah nasional Indonesia. Pembangunan wilayah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan wilayah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. (Ghalib R, 2005: 5).

Pendekatan yang bersifat regional mempunyai strategi yang berbeda, pendekatan ini biasanya didahului dengan melihat sumberdaya yang dimiliki oieh daerah yang dikembangkan. Daya dukung tersebut berupa tingkat ketersediaan sumberdaya yang masing-masing saling mendukung, sehingga dilakukan penelitian tentang daya dukung tersebut.

Salah satu tujuan kebijaksanaan pembangunan wilayah adalah untuk mengatur pembangunan daerah, meliputi ketentuan tentang otonomi daerah, keuangan daerah, kelembagaan daerah, dan sebagainya. Sebenarnya pembangunan wilayah tidak hanya mempermasalahkan bagaimana membagi habis wilayah geografis nasional atau wilayah-wilayah pembangunan ataupun wilayah-wilayah administrasi pemerintahan daerah, akan tetapi pengembangan sesuai dengan potensi serta prospek spesialisasinya dan juga bagaimana pengembangan wilayah-wilayah terbelakang.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa implikasi bahwa campur tangan pemerintah untuk tiap daerah berbeda pula. Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, dan kalau ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Gagasan ini timbul setelah melihat kenyataan bahwa kalau perkembangan ekonomi diserahkan pada kekuatan mekanisme pasar, biasanya cenderung akan memperbesar dan bukannya memperkecil ketidakmerataan antar daerah, karena kegiatan ekonomi akan menumpuk di tempat-tempat daerah tertentu, sedangkan tempat-tempat atau daerah lainnya akan semakin ketinggalan (Arsyad, 1998: 115).

Kunci utama otonomi daerah adalah desentralisasi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan dan desentralisasi fiskal. Proses desentralisasi harus berjalan seluas-luasnya, sehingga suatu ketika dan seterusnya hanya bidang-bidang strategis saja yang diurus oleh pemerintah pusat secara teknis, misalnya bidang pertahanan/keamanan, politik luar negeri, keuangan/moneter, dan sebagainya. Daerah harus lebih kreatif dan produktif, sentra-sentra pembangunan akan berkembang merata di daerah-daerah, sehingga mendorong terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan, disamping itu sistem desentralisasi akan mengurangi masalah-masalah demokratis seperti lebih meratanya kepadatan penduduk, berkurangnya arus urbanisasi, dan sebagainya (Widjaja, 2003: 7).

Perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan berdasarkan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain, sehingga untuk itu perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanan pembangunan daerah yang bersangkutan (Arsyad, 1998: 122).

Dengan latar belakang demikian, salah satu yang berkaitan dengan upaya optimalisasi kinerja pembangunan ekonomi daerah serta pemberdayaan sumberdaya yang dimiliki (potensial daerah) melalui pemberdayaan asset (investasi) adalah perlunya paradigma baru dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar lebih mensinergikan daya membangun, baik dari jalur *public investment* maupun *private investment*. Dengan paradigma baru ini diharapkan selain ada peningkatan efisiensi dan efektivitas hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat, juga mewujudkan iklim kondusif penanaman modal secara nyata, khususnya dalam aspek informasi maupun peningkatan faktor kepastian (*certainty factor*) yang sangat penting untuk mengurangi investment risk. Peran pemerintah daerah sangat menentukan sesungguhnya lebih terletak pada arah dan substansi kebijakannya untuk menciptakan iklim kondusif bagi perkembangannya investasi swasta/masyarakat.

Pengamatan tentang proses pembangunan suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peranan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dimana setiap sektor memberikan kontribusi yang berbeda dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga atau pendapatan terus menerus bertambah.

Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur, merupakan daerah yang tergolong potensial dengan laju pertumbuhan ekonomi secara riil yang cukup memadai per tahun sejak terjadinya krisis ekonomi nasional pada tahun 1997. Laju pertumbuhan ini semakin baik dibanding tahun-tahun terjadinya krisis ekonomi bahkan dengan pertumbuhan negatif. Dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2005 sekitar 1,4 juta jiwa, pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan dapat dikatakan cukup mantap. Hal ini terbukti pada tahun 2008 Kabupaten Lamongan memperoleh *Regional Trade, Tourism and Investment* (RTTI) *Award* dengan katagori kabupaten/bupati yang daerahnya mengalami kemajuan melalui perdagangan, pariwisata dan investasi dengan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang dimiliki. Sejalan dengan itu, perkembangan proses pembangunan yang terjadi di Kabupaten Lamongan akan membawa dampak pada terjadinya perubahan struktur perekonomian baik sektor primer, sektor sekunder, maupun tersier. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan dari tahun 2002 s/d 2007 atas dasar harga konstan tahun 2000. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lamongan disumbang oleh 9 (sembilan) sektor yaitu : *pertanian; pertambangan dan penggalian; industri; listrik, gas dan air;bangunan konstruksi; perdagangan dan hotel; angkutan dan komunikasi;* *keuangan dan bank; jasa-jasa* (BPS 2000:2).

Hasil-hasil pembangunan, pariwisata dan investasi Kabupaten Lamongan berdasarkan nilai PDRB terus mengalami kenaikan. Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ke Kabupaten Lamongan pada tahun 2007 berjumlah enam proyek dengan nilai investasi Rp 8,21 triliun. Pada tahun 2007 Kabupaten Lamongan merupakan daerah dengan investasi terbesar se-Jawa Timur. Keberhasilan Kabupaten Lamongan dalam menarik investor ke daerahnya dan juga mengembangkan potensi pariwisatanya telah membuka lapangan pekerjaan baru dan juga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakatnya.

Dengan berbagai potensi yang menjadi sumber kekuatan bagi perekonomian daerahnya. Potensi dan sektor prioritas dikembangkan dan diarahkan agar dapat tumbuh secara optimal guna menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat dan global juga diharapkan untuk memperkokoh perekonomian serta mewujudkan ketahanan ekonomi.

Potensi ekonomi dapat dianalisis dengan menentukan basis ekonomi. Basis ekonomi akan di lihat melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang mana lebih diprioritaskan sebagai penggerak utama perekonomian. Ini merupakan awal untuk menghasilkan kebijakan untuk dasar yang akan diterapkan oleh otoritas pembangunan di daerah. Kebijakan yang kurang tepat karena analisis basis ekonomi yang meleset dapat menjadi penghancur, bukan memperbaiki kondisi ekonomi suatu daerah justru akan menghambat laju pembangunan daerah tersebut. Diharapkan kebijakan dasar ini akan mempunyai daya dukung yang besar bagi perkembangan sumber-sumber pendapatan daerah non prioritas.

**METODELOGI**

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif komparatif. penelitian ini adalah PDRB Sektoral Kabupaten Lamongan yang dihitung berdasarkan harga konstan. Untuk melihat terjadinya perubahan struktur perekonomian (*economic landscape*) digunakan *Multiplier Product Matrix* (MPM) dengan model data *Input-output.*

**PEMBAHASAN**

Hasil analisis struktur Kabupaten Lamongan ditinjau dari sudut pandang keterkaitan antar sektor ekonomi,secara umum masih memiliki tingkat keterkaitan di bawah angka 1, baik dari analilisis keterkaitan ke depan maupun ke belakang. Keterkaitan ke depan memiliki arti sejauh mana output dari suatu sektor ekonomi digunakan sebagai input oleh sektor ekonomi lain, sedangkan keterkaitan ke belakang adalah sejauh mana sektor ekonomi menggunakan output sektor ekonomi lain sebagai input.

Dari hasil analisis struktur perekonomian Kabupaten Lamongan yang ditinjau melalui sudut pandang tingkat koefisien keterkaitan antar sektor, secara umum sektor-sektor tersebut masih memiliki tingkat ketrekaitan di bawah angka 1, baik dari segi keterkaitan kedepan maupun keterkaitan kebelakang. Menurut hasil keterkaitan ke belakang, tampak tiga sektor yang memiliki koefisien tertinggi dalam perekonomian Kabupaten Lamongan adalah sektor listrik, gas dan air bersih dengan koefisien sebesar 0,62; sektor industri pengolahan dengan koefisien keterkaitan ke belakang sebesar 0,54; dan sektor bangunan/kostruksi dengan tingkat koefisien keterkaitan kebelakang sebesar 0,52. Hal ini menunjukan bahwa struktur keterkaitan perekonomian Kabupaten Lamongan dominasi peran sektor listrik,gas dan air bersih terhadap sektor yang lain sangat tinggi, hal ini disebabkan peran sektor listrik,gas dan air bersih untuk digunakan sektor lain sangat besar.

Sektor perekonomian di Kabupaten Lamongan dengan tingkat keterkaitan kebelakang rendah didominasi oleh sektor hilir yang mana sektor tersebut umumnya langsung dikonsumsi atau dinikmati. Akibatnya peran sektor tersebut terhadap sektor lain sangat rendah. Tiga sektor yang memiliki kaitan terendah adalah sektor jasa-jasa sebesar 0,04; sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memiliki koefisien sebesar 0,07; dan sektor pertambangan dan penggalian dengan koefisien keterkaitan kebelakang sebesar 0,09. tingginya tingkat keterkaitan kebelakang dari sektor-sektor ekonomi, merupakan salah satu penunjang dalam pengembangan sektor ini dimasa depan.

Berdasarkan analisis keterkaitan kedepan Sektor pertambangan (0,94) memiliki keterkaitan ke depan yang tinggi, hal ini menunjukan bahwa output sektor tersebut banyak digunakan sebagai pendukung bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Sektor lain ysng memiliki koefisien cukup tinggi antara lain adalah sektor listrik,gas dan air bersih, pertanian, pengangkutan dan trasportasi dan industri pengolahan. Tingginya tingkat keterkaitan kedepan pada sektor-sektor tersebut umumnya terjadi pada sektor yang begitu tergantung pada sektor lain sebagai penyedian input (terutama bahan baku), yang digunakan dalam proses produksi pada sektor industri. Makin tinggi keterkaitan kedepan maka sektor tersebut semakin tinggi pula ketergantungan pada sektor-sektor lain dalam perekonomian.

Dari analisis keterkaitan dapat dilihat secara global sektor pertambangan dan penggalian memiliki tingkat keterkaitan kedepan yang relatif tinggi, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih memiliki tingkat keterkaitan kebelakang yang tinggi. Pemilihan sektor prioritas dalam pembangunan, yang bertujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tinggi dengan disertai terjadinya pemerataan pendapatan antara sektoral maupun penduduk, harus ditekankan pada sektor yang memiliki keterkaitan tinggi terhadap sektor yang menjadi tulang punggung sebagian besar penduduk. Adanya penanaman modal pada sektor ini tentunya akan memberikan dampak yang besar tehadap perekonomian, yang secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Pada akhirnya akan mampu meningkatkan skala perekonomian.

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Albert Hirchman mengenai konsem pembangunan tidak seimbang, bahwa dalam proses pembangunan di Negara berkembang yang cenderung memiliki keterbatasan sumber dana pembangunan, perlu adanya sektor unggulan yang dapat memicu perkembangan seluruh sektor melalui mekanisme efek perembesan (*trikle down effect*). Sektor yang dipilih menjadi prioritas dalam pembangunan diharapkan memiliki tingkat keterkaitan tinggi antar sektor dalam perekonomian, supaya perkembangan sektor prioritas akan berdampak positf terhadap sektor sebelumnya (sebagai penyedia input) maupun terhadap aktifitas sektor sesudahnya (pengguna output).

Berdasrakan analisis pengganda output dan pendapatan akan diketahui besarnya dampak yang diakibatkan dari adanya perubahan permintaan akhir terhadap peningkatan output dan pendapatan pada sektor tersebut. Peningkatan keterkaitan yang diikuti pengganda output akan berakibat pada peningkatan volume produksi suatu sektor sebagai akibat meningkatnya permintaan pasar akan berdampak positif dan luas terhadap sektor perekonomian lainnya.

Dari analisis pengganda output, tiga sektor yang selalu berada pada tingkat tertinggi adalah sektor listrik, gas dan air bersih, industri pengolahan dan bangunan/konstruksi. Dari tiga sektor tersebut, merupakan sektor listrik, gas dan air bersih (2,08) yang umumnya menggunakan input dari sektor-sektor lain. Melalui pengganda pendapatan, dapat dilihat bahwa sektor yang berada pada tinggkat tertinggi adalah sektor jasa-jasa dengan koefisien pengganda sebesar 0,67. kemudian disusul oleh

Sektor bangunan/kostruksi sebesar 0,55 dan sektor pertanian yang mempunyai koefisien pengganda sebesar 0,51.

Ditinjau dari tingginya koefisien pengganda suatu sektor, baik dari pengganda terhadap output dan pendapatan suatu sektor, maka jika terjadi perubahan melalui adanya injeksi atau permintaan akhir sektor tersebut akan meningkatkan output maupun pendapatan di sektor yang bersangkutan sebesar koefisien penggandanya. Hal ini akan berakibat pada perkembangan pada sektor lain yang menjadi penyedia input dan pemakai dari sektor tersebut.

Dari tingkat pengganda dapat diketahui bahwa sektor bangunan dan kontruksi mempunyai dampak paling besar melalui pengganda output dan pendapatan terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan dari adanya penanaman modal asing dan dalam negeri. Hal ini disebabkan tingginya tingkat koefisien output dan pendapatan, selain itu memperlihatkan kalau sektor tersebut sangat signifikan peranannya bagi sektor lain.

Adanya penanaman modal telah membawa perkembangan secara sektoral yang sudah tentu akan meningkatkan produktifitas dan daya saing produk di pasaran. Secara umum adanya menanaman modal maupun meningkatkan output dan pendapatan dari masing-masing sektor dalam perekonomian Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pengalaman hendaknya orientasi pengembangan penanaman modal lebih ke arah sektor yang memiliki sifat berkesinambungan dan sekaligus dapat menjadi pemicu bagi perkembangan ekonomi sektor lainnya serta dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Dari analisis gravitasi Kabupaten Lamongan dengan Daerah-daerah Sekitarnya , dapat diketahui bahwa kabuapten yang memiliki potesi kuat terhadap Kabupaten Lamongan adalah Kabupaten Gresik. Bahwa kabupaten Gresik merupakan wilayah terdekat dengan kabupaten Lamongan di bandingkan kabupaten lainnya yang berbatasan. Dengan stabilnya penduduk dan tingkat aksesbilitas yang tinggi maka kabupaten Gresik memiliki banyak fasilitas yang ditawarkan. Akan tetapi masih ada fasilitas yang harus disediakan. Agar tingkat aksesbilitas dapat berjalan lancar maka diperlukan peningkatan fasilitas lalulintas akses untuk ke kabupaten Gresik. Sedangkan kabuapten yang mempunyai akses kurang mendukung adalah Kabupaten Bojonegoro karena dengan jumlah penduduk yang padat akan tetapi tingkat aksesbilitas yang rendah membawa dampak kurang efektifnya hubungan kedua kabupaten ini. Fasilitas lalulintas untuk menuju ke kabupaten Bojonegoro juga cukup sulit dikarenakan akses jalan yang kurang baik. Dari kondisi diketahui bahwa orde kabupaten ini jika ingin ditingkatkan maka yang paling perlu adalah perbaikan aksesbilitas ke kabupaten Bojonegoro.

Dari visualisasi *economic landscape*, terlihat bahwa tahap pembangunan Kabupaten Lamongan atara tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 telah mengalami berbagai perubahan struktur perekonomian dan peran sektor-sektor ekonomi. Walaupun tidak mengalami perubahan yang drastis. Namun perubahan-perubahan tersebut semakin menegaskan pola perekonomian Kabupaten Lamongan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. sektor-sektor unggulan juga mengalami perubahan urutan, walau sektor unggulannya masih tetap, yaitu: sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengolahan, sektor penggalian dan pertambangan, sektor bangunan/kostrusi. Sehingga untuk memacu pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lamongan ke depan meliputi: peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja serta dampak stimulasi terhadap sektor-sektor lain, maka prioritas pembangunan dan investasi harus diarahkan ke sekotr-sektor unggulan ini.

dari visualisasi *economic landscape* terlihat bahwa sel-sel yang mengalami peningkatan peran adalah sel-sel yang terkait dengan sektor 4 (listrik, gas dan air bersih) dan sektor 5 (banguanan/konstrusi).

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran sektor-sektor ekonomi dan sektor unggulan (*key sector*) dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan yaitu telah terjadi pergeseran sektor unggulan, sebagaimana telah terlihat dalam perubahan urutan sektor unggulan. Namun walau mengalami perubahan urutan dari tahun 2000 ke tahun 2005, nama-nama lima sektor teratas masih tidak berubah yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengolahan, sektor penggalian dan pertambangan, sektor bangunan/kostrusi. Sehingga untuk memacu pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lamongan ke depan meliputi: peningkatan output, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja serta dampak stinulasi terhadap sektor-sektor lain, maka prioritas pembangunan dan investasi diarahkan ke sektor-sektor unggulan ini.
2. Keterkaitan Kabupaten Lamongan dengan Daerah-daerah Sekitarnya sehinnga menunjang pertumbuhan perekonomian, hal ini dapat diketahui bahwa kabuapten yang memiliki potesi kuat terhadap Kabupaten Lamongan adalah Kabupaten Gresik. Agar tingkat aksesbilitas dapat berjalan lancar maka diperlukan peningkatan fasilitas lalulintas akses untuk ke Kabupaten Gresik. Sedangkan kabuapten yang mempunyai akses kurang mendukung adalah Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini jika ingin ditingkatkan maka yang paling perlu adalah perbaikan aksesbilitas ke Kabupaten Bojonegoro.
3. Bahwa selama kurun waktu tahun 2000-2005 telah terjadi perubahan struktur perekonomian Kabupaten Lamongan, yang ditunjukan oleh perubahan dalam visualisasi *economic lanscape*. Perubahan ini mengindikasi adanya perubahan peran sektor-sektor penting bagi perekonomian pada tahun 2000-2005. perubahan strukt*ur* ini masih terlalu kecil, namun dapat diterangkan bahwa telah terjadi perubahan kontribusi output sektor ekonomi, perubahan sektor unggulan dan keterkaitan antar sektor ekonomi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Firman. 2009. *Persaingan Sub Sektor Peternakan dengan Sektor-sektor Perekonomian Lainnya di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah (Analisis Input-Output)*. Bandung: Unpad

Andreosso-O’Callaglan, Bernadette and Guoqiang Yue. 2000, *An Analysis Of Strucural Change in China Using Bipropotional Methods.* Economic Systems Research, Vol 12 Issue 1. Maret, 13-99

Arsyad, Lincolin dan Dekiawan, Hermada, 1997. *Pola Pengembangan Industri Manufaktur di Indonesia,* 1976-1993, JEBI, Volume 12, No.1,16-26.

Arsyad, Lincolin. 1998. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE-YKPN

Badan Pusat Statistik Lamongan. 2000. *Lamongan dalam Angka*. Lamongan.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Ghalib, R. 2005. *Ekonomi Regional*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

Glasson, J. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: LPFE-UI.

Hidayat Amir, Suahasil Nazara, 2005. *Analisis Perubahan Struktur Ekonomi(Economic Lanscape) dan Kebijakan Strategi Pembangunan Jawa Timr Tahun 1994 dan 2000: Analisis Input Output.* Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Januari 2005

Husaini dan Purnomo. 2003. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan dan Pengarahan Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: Rajawali.

Jhinggan, ML. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* Terjemahan edisi ke-enam belas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (d/n Rajawali Pers)

Kadariyah. 1990. *Ilmu Ekonomi Perencanaan*. Jakarta: LPFE-UI.

Wibowo Rudi, Sutrisno. 2004, *Konsep Teori dan Landasan Analisis Wilayah.* Bayumedia Publishing, Malang.

Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dasar Kebijakan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tambunan. 2001. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

Warpani, S. 1984. *Teori Perencanaan Pembangunan.* Jakarta: Erlangga

Widjaja, H. A. W. 1992. *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II.* CV Rajawali. Jakarta.

Widodo. 1990. *Teori Perencanaan dan Penerapan.* Jakarta: Erlangga

[www.lamongan.go.id](http://www.lamongan.go.id)

[www.jatimprov.go.id](http://www.jatimprov.go.id)

**Pendekatan Ekonomi Islam Dalam Tinjauan Sejarah**

**Achmad Fageh \*)**

\*)Dosen UIN Sunan Ampel DPK pada Universitas Islam Lamongan

**ABSTRACT**

*The indications show that the advent of Islamic economics in the classical and medieval times, deeply felt in Britain, the birthplace of Adam Smith, even long before he was born. In 774 AD, King Offa who in England at that time printed gold coins which is a direct copy of the Islamic dinar, including Arabic script. All the writing on the coin (coin) is Arabic, except on one side written OFFAREX. The reality shows that the Islamic dinar was the strongest currency in the world. In addition, the economy of Muslims is much more advanced than Europe. It shows that the international trade of Muslims has reached to Northern Europe. The above explanation shows that the role and thought of Muslim scientists in economics is very significant to the world and to the rise of European intellectualism though.*

**A.PROLOG**

Fiqih merupakan salah satu khazanah keislaman dengan bidang kajian sangat luas. Secara garis besar, kajian fiqih Islam mencakup tiga dimensi, yaitu dimensi hubungan vertikal (*'alâ>qatul insa>n birabbihi>)*, dimensi hubungan internal (*'alâqatul insan binafsihi)*, dan dimensi hubungan sosial (*'alâ>qatul insa>n bi mujtama'ihi>).*

Secara spesifik, makalah ini akan mengkaji dimensi hubungan sosial dalam fiqh, yang sering disebut dengan fiqih muamalah. Ustadz Shalih bin Ghanim As-Sadlan[[1]](#footnote-1) membagi tema fiqih muamalah menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum Perdata *(Al-Ahwa>l Asy-Syakhsiyah)* yang membahas masalah keluarga, pernikahan, perceraian, nafkah, hak waris, dan sejenisnya. Fiqih di sini berfungsi mengatur hubungan antar suami istri dan keluarga.

2. Hukum Sipil *(Al-Qanu>n Al-Madani>)* yang membahas interaksi dan transaksi antar individu, seperti jual beli, ijarah, rahn, kafalah, dan sejenisnya. Fiqih di sini berfungsi mengatur interaksi ekonomi masyarakat dan menjaga terpenuhinya hak-hak ekonomi masyarakat.

3. Hukum Pidana *(Al-Qanu>n Al-Jina'>i)* yang membahas tentang perilaku-perilaku kriminal dan sanksi-sanksinya. Fiqih di sini berfungsi melindungi nyawa, harta, kehormatan, dan hak setiap muslim, serta menjaga stabilitas keamanan.

4. Hukum Acara Perdata dan Pidana (*Al-Ahka>m Al-Mura>fa'at Al-Madaniyyah Wa Al-Jina>iyyah*) yang membahas tentang tata cara pengaduan, peradilan, dan sejenisnya. Fiqih di sini berfungsi menegakkan keadilan di antara umat manusia.

5. Aturan Perundang-Undangan (*Al-Ahka>m Ad-Dustu>riyyah*) yang mem­bahas tentang dasar dan sistem hukum negara Islam. Fiqih di sini berfungsi menentukan hubungan antara penguasa dan rakyat, serta menentukan hak dan kewajiban masyarakat.

6. Aturan Hukum Internasional *(Al-Ahka>m Ad-Dua>liyyah)* yang membahas tentang hubungan negara Islam dengan negara lain ketika damai dan saat perang, hubungan warga non muslim dengan warga muslim, termasuk tentang jihad dan perjanjian. Fiqih di sini berfungsi untuk menetapkan jenis hubungan, kerja sama dan sikap saling menghormati antar negara.

7. Undang-Undang Ekonomi Dan Moneter *(Al-Ahka>m Al-Iqtisha>diyyah Wal Ma>liyah)* yang membahas tentang hak dan kewajiban ekonomi masyarakat, hak dan kewajiban ekonomi negara, dan mengatur anggaran pendapatan dan belanja. Fiqih di sini berfungsi mengatur hubungan ekonomis antara pihak kaya dan pihak miskin, serta antara negara dan masyarakat.

8. Hukum Etika Dan Sopan Santun *(Al-Akhla>q Wa Al-Adab).*

Dari beberapa tema kajian fiqih muamalah di atas, makalah ini akan lebih mengkhususkan lagi untuk membahas ‘pemikiran’ ekonomi Islam periode klasik dan pertengahan. Di sini perlu ditegaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai studi pemikiran, makalah ini tidak berpretensi untuk membahas ‘praktik-praktik’ model perekonomian Islam, seperti jual beli, rahn, ijarah, muzara’ah, dan sejenisnya, karena kajian-kajian semacam itu lebih tepat dikaji di fakultas ekonomi Islam.

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam adalah respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Sunnah, juga oleh ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Pemikiran adalah sebuah proses kemanusiaan, namun ajaran Al-Quran dan sunnah bukanlah pemikiran manusia. Yang menjadi objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi, tetapi pemikiran para ilmuwan Islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktek historis. Dengan demikian, tulisan ini hanya fokus kepada kajian historis, yakni bagaimana usaha manusia dalam menginterpretasi dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran pada waktu dan tempat tertentu dan bagaimana orang-orang dahulu mencoba memahami dan mengamati kegiatan ekonomi juga menganalisa kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masanya. Jadi, cakupan sejarah pemikiran ekonomi Islam dalam tulisan ini ialah mengkaji bagaimana pemikiran para ilmuwan Islam sepanjang sejarah dan membahas sejarah ekonomi Islam yang terjadi secara aktual [[2]](#footnote-2)

Di sini, kami juga merasa perlu untuk menyebutkan bahwa limitasi studi pemikiran ekonomi Islam ke dalam klasik dan pertengahan cukup mengundang dilema. Sebab, dalam kajian-kajian pemikiran ekonomi Islam sendiri, sebatas pengetahuan kami, tidak ada kata sepakat tentang batasan-batasannya.[[3]](#footnote-3) Namun demikian, di dalam makalah ini kami berikhtiyar untuk membuat batasan klasik dan pertengahan. Pemikiran ekonomi klasik dalam makalah ini dimulai dari masa Rasulullah sampai jatuhnya kota Bagdad di tangan pasukan Mongol pada pertengahan abad ke-7 H (abad 7-13 M). Sedangkan abad pertengahan dimulai dari pertengahan abad ke-7 H sampai abad 14 H (13-19 M) dengan munculnya Muhammad Iqbal pada 1932 M yang mengakhiri stagnasi pemikiran umat Islam.

**B. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK**

Dalam literatur Islam, sangat jarang ditemukan tulisan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam atau sejarah ekonomi Islam. Buku-buku sejarah Islam atau sejarah peradaban Islam tidak menyentuh sejarah pemikiran ekonomi Islam. Buku-buku sejarah Islam itu lebih dominan bermuatan sejarah politik.

Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa sistem ekonomi Islam tidak punya akar sejarahnya. Prof. Dr. Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, guru besar ekonomi Universitas King Abdul Aziz Saudi mengatakan bahwa Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia untuk 1000 tahun, tidak mungkin tanpa diiringi dengan ide-ide ekonomi dan sejenisnya. Dari Abu Yusuf pada abad ke 2 Hijriyah sampai ke Thusi dan Waliullah abad 18 H, kita memiliki kesinambungan dari serentetan pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai perpajakan, pengeluaran pemerintah, ekonomi rumah tangga, uang dan perdagangan, pembagian kerja, monopoli, pengawasan harga, dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan, tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh yang diberikan atas khazanah intelektual yang berharga ini oleh pusat-pusat riset akademik di bidang ilmu ekonomi.[[4]](#footnote-4)

Pada dasarnya, ekonomi Islam lahir sejak Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Mekah dan Madinah. Perhatian Islam terhadap masalah ekonomi sangat besar. Bahkan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran berisi tentang masalah perekonomian; bukan masalah ibadah (*m­ahdah*) atau akidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 surah Al-Baqarah, yang menurut Ibnul Arabi,[[5]](#footnote-5) ayat ini mengandung 52 hukum atau masalah ekonomi.

C.C. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in the Quran* menerangkan bahwa Al-Quran memakai 20 terminologi bisnis yang diulang sebanyak 720 kali. Dua puluh terminologi bisnis tersebut adalah 1.Tijarah, 2. Bai’, 3. Isytara, 4. Dain (Tadayan), 5. Rizq, 6. Riba, 7. dinar, 8. dirham, 9. qismah 10. dharb/mudharabah, 11. Syirkah, 12. Rahn, 13.Ijarah/ujrah, 14. Amwal 15.Fadlillah 17. akad/’ukud 18. Mizan (timbangan) dalam perdagangan, 19. Kail (takaran) dalam perdagangan, dan 20. waraq (mata uang).[[6]](#footnote-6)

Nabi Muhammad menyebut ekonomi sebagai pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadits, ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan umat Islam untuk menguasai perdagangan. Rasul saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالتِّجَارَةِ ، فَإِنَّ فِيْهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ . (رواه أحمد)

*“Berdaganglah kalian, karena di dalamnya terkandung sembilan puluh persen (pintu) rezeki”. (HR. Ahmad)*

Pada masa Rasulullah, permasalahan ekonomi yang muncul di masyarakat akan langsung diselesaikan atau ditanyakan kepada Rasulullah dan secara kontekstual persoalan ekonomi belum begitu kompleks. Namun, setelah Rasulullah wafat, kehidupan ekonomi berkembang dan permasalahan atau problematika semakin komplek, sehingga memunculkan berbagai pemikir ekonomi yang sangat mewarnai perkembangan dinamika dari ajaran ekonomi Islam. Para ulama mulai banyak yang menulis buku-buku yang membahas tentang ekonomi.

Sejarah membuktikan bahwa Ilmuwan muslim pada era klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam tidak saja secara normatif, tetapi juga secara empiris dan ilmiah dengan metodologi yang sistematis. Selain itu, banyak ditemukan buku-buku yang khusus membahas bagian tertentu dari ekonomi Islam, seperti Kitab *Al-Kharaj*karangan Abu Yusuf (w.182 H/798 M), Kitab *Al-Kharaj* karangan Yahya bin Adam (w.203 H), Kitab *Al-Kharaj* karangan Ahmad bin Hanbal (w.221 M), Kitab *Al-Amwal* karangan Abu ’Ubaid Qasim bin Salam (w.224 H), Kitab*Al-Amwal* karangan Ibnu Zanjawaih (w.251), dan kitab *Al-Iktisab fi al Rizqi* karangan Muhammad Hasan Asy-Syabany (w.234 H). Masih banyak lagi buku-buku lainnya, baik yang secara khusus berbicara tentang ekonomi ataupun buku-buku fikih yang hanya membahas masalah-masalah hukum ekonomi. Buku-buku tersebut sarat dengan kajian ekonomi, seperti kebijakan moneter, fiskal (zakat dan pajak), fungsi uang, mekanisme pasar, monopoli, perburuhan, pengaturan usaha individu dan perserikatan, lembaga keuangan (baitul mal), dan syairafah (semacam Bank Devisa Islam). Mereka juga ada yang membahas kajian ekonomi murni, ekonomi sosial, dan ekonomi politik. Berikut ini akan disampaikan dua kajian pemikir ekonomi klasik, yang, menurut kami, representatif untuk mewakili era klasik awal dan era klasik akhir.

**1. Konsep Kebijakan Fiskal Abu Yusuf dalam Kitab *Al-Kharaj***

Penulisan kitab Al-Kharaj adalah wujud pertanggungjawaban Abu Yusuf atas permintaan dan pertanyaan khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) tentang sistem operasional pemerintah berlandaskan agama, termasuk sistem perpajakan, administrasi keuangan dan anggaran negara.

Abu Yusuf mengisahkan bahwa Khalifah (amirul mukminin) Harun al-Rasyid memintanya untuk menyiapkan sebuah kitab dengan pembahasan yang luas, termasuk masalah ekonomi makro, untuk menjadikan pedoman generasi selanjutnya dan mencegah terjadinya krisis ekonomi nasional. Abu Yusuf kemudian menganalisis keadaan ekonomi negara dengan melakukan observasi di beberapa wilayah teritorial agar dapat mengambil langkah secara tepat dalam mengadopsi sistem perekonomian suatu negara untuk kemaslahatan umat manusia dan negara. Setelah melakukan observasi dan menganalisis berbagai wilayah, Abu Yusuf kemudian mengusulkan untuk membentuk suatu lembaga pemerintah dalam bidang keuangan negara (departemen keuangan).

Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* mengutip seluruh sistem perpajakan yang diwajibkan untuk para petani dan lainnya, menentang pajak hasil bumi yang dikenakan pada petani, menegaskan pengawasan dan pengumpulan pajak, serta membahas tentang refleksi pasar, tarif dasar pajak dan lainnya.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj*berbentuk pemikiran ekonomi kenegaraan, mengupas tentang kebijakan fiskal, yang berkenaan dengan pendapatan negara. Hal tersebut terlihat dari muatan pemikirannya yang memetakan mekanisme pendapatan negara (Income) dan pengeluaran (Expenditure).[[7]](#footnote-7)

**2. Konsep Uang Al-Ghazali dalam Kitab *Ihya’ Ulumiddin***

Konsep keuangan Al-Ghazali merupakan konsep yang unik karena aspek sufistik terkandung dan berpengaruh di dalamnya. Konsep ini dapat ditemukan dalam kitab *Ihya 'Ulumiddin,[[8]](#footnote-8)* di mana di dalam salah satu sub babnya Al-Ghazali membicarakan masalah uang yang dipergunakan manusia sebagai nikmat dari Allah.

Sejarah perkembangan uang, menurut Al-Ghazali, dimulai dari*barter* (*al-Mufawadhah*) hingga pada penggunaan logam mulia, yaitu emas dan perak. Barter dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Kegiatan tukar menukar barang ini dengan jalan "tukar ganti", yakni memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain dan untuk mendapatkan barang gantian yang dibutuhkan. Sebelum pertukaran dengan uang berkembang, barang-barang diperdagangkan dengan barter ini.

Al-Ghazali menulis bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia telah melakukan kegiatan bisnis melalui transaksi jual beli. Ia mengakui bahwa dulu perdagangan atau jual beli telah dikenal banyak orang. Akan tetapi, cara sederhana yang mereka pergunakan adalah dengan saling tukar menukar barang dengan barang yang dimiliki oleh orang lain, meskipun pada dasarnya sistem barter ini terbatas pada beberapa jenis barang saja.

Lama kelamaan, setelah masyarakat mengenal spesialisasi dan perdagangan semakin luas, cara barter semakin tidak sesuai lagi, karena sulit sekali menemukan pihak lain yang kebetulan mempunyai barang yang sama dengan yang kita butuhkan, dan dia pun membutuhkan apa yang kita tawarkan kepadanya dengan nilai yang kira-kira sama atau dapat dibandingkan, dan ia bersedia menukarnya. Untuk itu, melihat semakin besarnya jangkauan perdagangan, sistem barter tersebut perlu direvisi dan diganti dengan menciptakan sesuatu yang nilainya disepakati bersama, yaitu uang. Kebutuhan akan adanya uang ini juga mengkonsekwensikan adanya lembaga khusus yang mengurusnya. Untuk itu, menurut Al-Ghazali dibutuhkan lembaga keuangan yang kemudian mengurus pembuatan dan percetakan uang, yang disebut dengan *Dar al-Darb* *wa ash-Shayarifah* (lembaga pencetakan dan penukaran), sebagai pengendali aktivitas moneter terpusat, guna mengefektifkan fungsi-fungsi administrasi negara.

Gagasan Al-Ghazali dengan teori evaluasi uangnya dapat memberikan gambaran jelas tentang terjadinya perpindahan (*transformasi*) dari sistem perekonomian (*transaction*) barter menuju perekonomian yang menggunakan sistem mata uang logam, yaitu dinar dan dirham.

Menurut Al-Ghazali fungsi uang adalah sebagai *medium of Exchange*(alat tukar) dan *unit of account* (satuan pengukur). Uang sebagai alat tukar berarti uang dapat mengubah suatu barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dalam liquiditasnya, uang dapat menjadi alat untuk memudahkan, yaitu sebagai alat untuk pembayaran dalam semua bentuk transaksi. Sedangkan uang sebagai satuan pengukur adalah, uang berfungsi menjadi pengukur terhadap pertukaran barang lain. Misalnya, untuk mengetahui apakah lima buah baju sama dengan satu kue maka perlu diketahui harga lima baju dan satu kue tersebut. Inilah fungsi uang di dalam Islam. Uang tidak memiliki harga tetapi uang dapat merefleksikan semua harga, sebagaimana huruf dalam kalimat dan cermin terhadap warna, keduanya hanya merefleksikan. Al-Ghazali mengatakan, "*wa mauqi'uhuma fi>l amwa>l kamauqi'il harfi minal kala>m, wa kamauqi'il mir'ati minal alwa>n”.*

Dalam hal ini, Kalau kita melihat sejenak fungsi uang di mata ekonomi konvensional, kita akan menemukan fungsi ketiga selain dua fungsi di atas, yaitu uang berfungsi sebagai *store of value* (penyimpan nilai) yang merupakan konsekuensi logis dari pengakuan teori konvensional terhadap adanya *motif money demand for speculation*. Tapi islam secara tegas menolak fungsi tersebut. Islam hanya memperbolehkan uang dipergunakan untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga, dan menolak penggunaan uang untuk motif spekulasi. Al-Ghazali mengingatkan, "*Kama> anna> habsahu z}ulmun. Fala> ma'na> liba>i'in naqdi bin naqdi illat-tikha>dzun naqdi maqshu>dan lil iddikha>r. Wahuwa z}ulmun."*

Pada akhirnya, Al-Ghazali berkesimpulan bahwa menggunakan uang sebagaimana yang disyariatkan agama, yakni dengan cara bermuamalah yang baik adalah salah satu bentuk syukur nikmat. Sebaliknya, jika uang digunakan tidak sesuai yang disyariatkan agama maka ia berbuat zalim, bahkan kufur nikmat.[[9]](#footnote-9)

**C. PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA PERTENGAHAN**

Jatuhnya kota Bagdad ke tangan Mongol (1258 M) adalah pukulan telak bagi umat Islam. Masa ini juga dikenal sebagai masa transisi. Disebutkan di dalam sejarah, bahwa sejak kejatuhan kota Bagdad ini, umat Islam mulai terpecah. Bahkan hampir kurang lebih selama tiga tahun umat Islam tidak memiliki khalifah.[[10]](#footnote-10)

Ketika kondisi politik tidak kondusif seperti itu, kajian-kajian ilmiah juga terpengaruh, termasuk kajian tentang ekonomi Islam. Beberapa ulama yang menekuni studi ekonomi pada masa ini antara lain Ibn Taimiyah (1262-1328), Ibnul Qayyim (1292-1350 M), Ibn Khaldun (1332-1406), dan Ibnu Rajab Al-Hambali (1336-1393 M). Pada akhir-akhir masa pertengahan muncul pemikir ekonomi Islam, seperti Shah Waliullah (1702-1763).

**1. Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah dalam Kitab *As-Siya>sah Asy-Syar'iyyah***

Pemikiran ekonomi Ibnu Taymiyah yang sangat signifikan dalam kehidupan adalah mengenai kompensasi wajar, (*just compensation*), harga wajar (*just price*), mekanisme pasar, regulasi harga, hak kepemilikan, konsep bunga dan uang, kebijakan moneter, kemitraan (*partnership*), peran negara dan kueangan negara (*public finance*). Dasar pijakan pemikiran Ibnu Taymiyah sangat penuh dengan nilai-nilai etika yang selalu menggunakan landasan Al-Quran , Sunnah Rasul dan Ijtihad untuk memenuhi tuntutan zaman.[[11]](#footnote-11)

**2. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dalam Kitab *Muqaddimah***

Di antara pemikir era klasik dan pertengahan yang mengkaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja Bapak sosiologi, melainkan juga Bapak ilmu Ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir Barat modern tersebut. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebuah karya ilmiah berjudul *Abul Iqtishad : Ibnu Khaldun.*Dalam tulisan tersebut Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikan­nya pada Simposium tentang Ibnu Khaldun di Mesir 1978.

Sebelum Ibnu Khaldun, kajian-kajian ekonomi di dunia Barat masih bersifat normatif, adakalanya dikaji dari perspektif hukum, moral, dan adapula dari perspektif filsafat. Karya-karya tentang ekonomi oleh para ilmuwan Barat, seperti ilmuwan Yunani dan zaman Scholastic bercorak tidak ilmiah, karena pemikir zaman pertengahan tersebut memasukkan kajian ekonomi dalam kajian moral dan hukum. Sedangkan Ibnu Khaldun mengkaji problem ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan fenomena ekonomi secara aktual.

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, menuliskan poin-poin penting dari materi kajian Ibnu Khaldun tentang ekonomi, bahwa Ibnu Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya.

Sejalan dengan Shiddiqy, Boulokia dalam tulisannya*Ibn Khaldun: A Fourteenth Century Economist,”*menuturkan bahwa Ibn Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahiran ”resminya” (di Eropa). Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada fluktuasi jangka panjang.

Lafter, penasehat ekonomi presiden Ronald Reagan, yang menemukan teori Laffter Curve, berterus terang bahwa ia mengambil konsep Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengajukan obat resesi ekonomi, yaitu mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran (ekspor) pemerintah. Pemerintah adalah pasar terbesar dan ibu dari semua pasar dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya. Jika pasar pemerintah mengalami penurunan, maka adalah wajar jika pasar yang lain pun akan ikut turun, bahkan dalam *agregate* yang cukup besar.

Oleh karena besarnya sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran ekonomi, maka Boulakia mengatakan bahwa sangat bisa dipertanggung jawabkan jika kita menyebut Ibnu Khaldun sebagai salah seorang Bapak ilmu ekonomi.Shiddiqi juga menyimpulkan bahwa Ibn Khaldun secara tepat dapat disebut sebagai ahli ekonomi Islam terbesar.[[12]](#footnote-12)

Kontribusi Ibnu Khaldun yang lain dalam bukunya Muqaddimah adalah bahwa jatuh bangunnya suatu dinasti atau peradaban sangat tergantung pada kesejahteraan atau kesulitan manusia. Dalam analisisnya, fenomena jatuh dan bangunnya suatu dinasti atau peradaban sangat bergantung tidak saja pada variabel-variabel ekonomi, tetapi juga pada sejumlah faktor lain yang turut menentukan kualitas individu, masyarakat, penguasa, dan lembaga-lembaga.

Secara keseluruhan model Ibnu Khaldun dapat diringkas dalam nasihatnya kepada para raja sebagai berikut:

1. Kekuatan kedaulatan (*al-mulk*) tidak dapat dipertahankan kecuali dengan mengimplementasikan syariah;
2. Syariah tidak dapat diimplementasikan kecuali oleh sebuah kedaulatan (*al-mulk*);
3. Kedaulatan tak akan memperoleh kekuatan kecuali bila didukung oleh sumber daya manusia (*ar-rija>l*);
4. Sumber daya manusia tidak dapat dipertahankan kecuali dengan harta benda (*al-ma>l*);
5. Harta benda tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan (*al-imara>h*);
6. Pembangunan tidak akan dicapai kecuali dengan keadilan (*al-‘adl*);
7. Keadilan merupakan tolok ukur (*al-miza>n*) yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia; dan
8. Kedaulatan mengandung muatan tanggungjawab untuk menegakkan keadilan.[[13]](#footnote-13)

**D. EPILOG**

Dalam tiga dekade belakangan ini, kajian dan penelitian ekonomi Islam kembali berkembang. Berbagai forum internasional tentang ekonomi Islam telah sering dan banyak digelar di berbagai negara, seperti konferensi, seminar, simposium, dan workshop. Puluhan doktor dan profesor ekonomi Islam yang ahli dalam ekonomi konvensional dan syariah tampil sebagai pembicara dalam forum-forum tersebut.

Dari kajian mereka ditemukan bahwa teori ekonomi Islam sebenarnya bukan ilmu baru ataupun ilmu yang diturunkan secara mendasar dari teori ekonomi modern yang berkembang saat ini. Fakta historis menunjukkan bahwa para ilmuwan Islam zaman klasik adalah penemu dan peletak dasar semua bidang keilmuan, termasuk ilmu ekonomi.

Justru, kebangkitan Eropa pada abad ke 12 Masehi disebabkan oleh adanya persinggungan Eropa dengan dunia Islam yang sangat tinggi di Spanyol dan Palestina. ada *great gap* dalam sejarah pemikiran ekonomi antara Islam dan Eropa selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai *dark ages*. Masa kegelapan Barat tersebut sebenarnya adalah masa kegemilangan Islam. Ketika Barat dalam suasana kegelapan dan keterbelakangan itu, Islam sedang jaya dan gemilang dalam ilmu pengetahuan dan peradaban. *The dark ages* dan kegemilangan Islam dalam ilmu pengetahuan adalah suatu masa yang sengaja ditutup-tutupi barat, karena pada masa inilah pemikiran-pemikiran ekonomi Islam 'dicuri' oleh ekonom Barat. Proses pencurian itu diawali sejak peristiwa perang salib yang berlangsung selama 200 tahun, yakni dari kegiatan belajarnya para mahasiswa Eropa di dunia Islam.

Dalam abad 11 dan 12 M, sejumlah pemikir Barat seperti Constantine the African dan delard of Bath melakukan perjalanan ke Timur Tengah, belajar bahasa Arab dan melakukan studi serta membawa ilmu-ilmu baru ke Eropa. Leonardo Fibonacci atau Leonardo of Pisa (w.1240) belajar di Bougioe, Aljazair pada abad ke 12. Ia juga belajar aritmatika dan matematikanya Al-Khawarizmi. Sekembalinya dari Arab, ia menulis buku Liber Abaci pada tahun 1202.

Kemudian banyak pula mahasiswa dari Itali, Spanyol, dan Prancis Selatan yang belajar di pusat kuliah Islam untuk belajar matematika, filsafat, kedokteran, kosmografi, dan ekonomi. Setelah pulang ke negerinya, mereka menjadi guru besar di universitas-universitas Barat. Pola pengajaran yang dipergunakan adalah persis seperti kuliah Islam, termasuk kurikulum serta metodologi ajar-mengajarnya. Universitas Naples, Padua, Salero, Toulouse, Salamaca, Oxford, Monsptellier dan Paris adalah beberapa universitas yang meniru pusat kuliah Islam.

Sejarah juga mencatat bahwa ilmuwan terkemuka Raymond Lily (1223-1315 M), belajar di universitas Islam. Sepulangnya ke Eropa ia banyak menulis tentang kekayaan khazanah keilmuan Islam dan selanjutnya mendirikan The Council of Vienna (1311) dengan lima buah fakultas yang mengajarkan bahasa Arab sebagai mata kuliah utama. Dengan pengusaan bahasa Arab, mereka menerjemahkan karya-kaarya Islam ke bahasa latin. Salah satu materi yang diterjemahkan adalah berkenaan dengan ilmu ekonomi Islam. Beberapa penerjemah tersebut antara lain, Michael Scot, Herman the German, Dominic Gusdislavi, Adelard Bath, Constantine the African, John of Seville, Williem of Luna Gerard of Cremona, Theodorus of Antioch. Alfred of Sareshel dan banyak lagi deretan penerjemah. Di antara para penerjemah itu terdapat penerjemah Yahudi, seperti Jacob of Anatolio, Jacon ben Macher, Kalanymus ben kalonymus, Moses ben Salomon, Shem Tob ben Isac of Tortosa, Salomon Ibn Ayyub, Todros Todrosi, Zerahoyah Gracian, Faraj ben Salim dan Yacub ben Abbob Marie.

Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain, teori *invisible hands* yang berasal dari Nabi saw dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadits Nabi Saw. sebagaimana disampaikan oleh Anas RA, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadits tersebut diriwayatkan sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : غَلاَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلاَ السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّى أَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ بِدَمٍ وَلاَ مَالٍ . (روه الدارمي)

*Harga melambung pada zaman Rasulullah saw. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, “Ya Rasulullah, harga-harga melambung tinggi; hendaklah engkau menetukan harga.” Rasulullah saw. Kemudian menjawab, ”Sesungguhnya Allah-lah yang menetukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rezeki. Sungguh aku sangat berharap menemui tuhanku, sedang tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku tentang kezaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam darah maupun harta.”*(HR. Ad-Darimi)

Dengan hadits ini terlihat jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep *invisible hand* atau mekanisme pasar daripada Adam Smith. Inilah yang mendasasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah saw. dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Maka sekali lagi ditegaskan kembali bahwa teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* itu lebih tepat dikatakan *God Hands*?

Bahkan, Bapak ekonomi Barat itu, dengan bukunya *The Wealth of Nation* diduga keras banyak mendapat inspirasi dari buku Al-Amwalnya Abu ‘Ubaid. Judul buku Adam Smith saja persis sama dengan judul buku Abu ‘Ubaid yang berjudul Al-Amwal.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan pengaruh ekonomi Islam terhadap ekonomi Barat dan modern ialah diadopsinya kata credit yang dalam ekonomi konvensional dikatakan berasal dari credo (pinjaman atas dasar kepercayaan). Credo sebenarnya berasal dari bahasa Arab *“qa-ra-da”* yang secara fikih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. *Hiwalah* yang dipraktekkan sejak zaman Nabi, baru dikenal oleh praktisi perbankan konvensional tahun 1980-an dengan nama anjak piutang.

Menurut Dr Sami Hamond, seorang ahli perbankkan dari Yordan, cek pertama yang ditarik di dunia ini bukan oleh tukang besi Inggris tahun 1675 di London sebagaimana disebutkan dalam textbook Barat, tetapi dilakukan oleh Saifudawlah Al-Hamdani, putra mahkota Aleppo yang berkunjung ke Bagdad pada abad X Masehi. Penukaran mata uang mengakui keabsahan cek yang dikeluarkan putera mahkota karena ia mengenal tanda tangannya. Dalam Encyclopedia of Literates, menurut Hamond, juga diceritakan seorang penyair bernama Jahtha menerima selembar cek yang ia gagal menguangkannya. Ini terjadi juga pada abad ke 10 Masehi. Sejarah itu menunjukkan bahwa pada abad ke 10 yang lalu cek sudah dikenal dalam ekonomi Islam. Seorang pengelana Persia Naser Kashro yang pergi ke kota Bashrah pada abad ke 10 M menceritakan, bahwa uang yang dibawanya diserahkan pada penukar mata uang dan ia menerima kertas berharga, semacam traveller cheques yang dipakai dalam berbelanja.

Indikasinya menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Islam zaman klasik dan pertengahan, sangat terasa di Inggris, tanah kelahiran Adam Smith, bahkan jauh sebelum ia lahir. Pada tahun 774 M, Raja Offa yang di Inggeris ketika itu mencetak koin emas yang merupakan copy langsung (direct copy) dari dinar Islam, termasuk tulisan Arabnya. Semua tulisan di coin (uang logam) itu adalah tulisan Arab, kecuali pada satu sisinya tertulis OFFAREX. Realitas itu menunjukkan bahwa dinar Islam saat itu merupakan mata uang terkuat di dunia. Selain itu, perekonomian umat Islam jauh lebih maju dari Eropa. Hal itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional muslim telah menjangkau sampai Eropa Utara. Paparan di atas menunjukkan bahwa peran dan pemikiran-pemikiran ilmuwan muslim dalam ekonomi sangat signifikan terhadap dunia dan terhadap kebangkitan intelektualisme Eropa sekalipun.

**PUSTAKA**

Abu Zakariya, Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qurasyi, *Al-Kharaj.*Maktabah Syamilah.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya’ Ulumiddin.*Jilid 2 dan 3. Maktabah Syamilah.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. *Risalah fi al-Fiqhi al-Muyassar.*Arab Saudi: *Wizarah Syu'un Islam wa al-Auqaf wa ad-Da'wah wa al-Irsyad.*1425 H.

Ibnul Arabi, *Ahkamu Al-Quran.*Jilid 1.Maktabah Syamilah.

Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah.*Jilid 1.Maktabah Syamilah.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah,*Maktabah Syamilah.

Karim, Abdul. Prof. Dr. M.A., M.A. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam.*Jogjakarta:Pustaka Book Publisher, cet. Ii. 2009.

***Website:***

<http://eei.fe.umy.ac.id/index.php?option=page&id=94&item=265>.

<http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=100>

[http://id.shvoong.com/books/1834907-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam](http://id.shvoong.com/books/1834907-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/).

[http://samuderailmufortuna.blogspot.com/2009/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-Islam.html](http://samuderailmufortuna.blogspot.com/2009/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam.html)

[http://sbypresidenku.com/content/pengejawantahan\_ekonomi\_Islam](http://sbypresidenku.com/content/pengejawantahan_ekonomi_islam)

http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/11983509.html.

1. Shalih bin Ghanim As-Sadlan, 1425 H. *Risa>lah fi al-Fiqhi al-Muyassar, Wiza>rah Syu'un Isla>m wa al-Auqa>f wa ad-Da'wah wa al-Irsya>d,*Arab Saudi. [↑](#footnote-ref-1)
2. [http://samuderailmufortuna.blogspot.com/2009/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-Islam.html](http://samuderailmufortuna.blogspot.com/2009/04/sejarah-pemikiran-ekonomi-islam.html) [↑](#footnote-ref-2)
3. Sebagai contoh, dalam bukunya, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Era Klasik hingga Modern dan Perbandingannya dengan Ekonomi Konvensional*, Dr. Deliarnov Anwar membagi sejarah pemikiran ekonomi Islam pada empat fase. *Fase pertama*, pemikiran-pemikiran ekonomi Islam baru pada tahap meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam, dimulai sejak awal Islam hingga pertengahan abad ke-5 H/ 7-11 Masehi. *Fase kedua* adalah “cemerlang”, berlangsung dari abad 11-15 Masehi. *Fase ketiga* adalah stagnasi, ditandai dengan kemunduran Dunia Islam dalam khazanah intelektual, sejak 1446 hingga munculnya pemikir Muhammad Iqbal pada 1932. *Fase keempat* adalah modern, ditandai dengan kebangkitan Dunia Islam dari stagnasi pemikiran selama lima abad sejak pertengahan abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20. Jadi, di dalam buku ini, fase klasik dan pertengahan tidak dicantumkan. Sementara itu, Agustianto mengatakan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik adalah sejak abad 2 Hijrah s/d 9 Hijriyah. Lihat http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoogroups.com/11983509.html. Lihat juga, <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=100> [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=100> [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibnul Arabi, *Ahka>mu Al-Qura>n,*Maktabah Syamilah, jilid I, 496. [↑](#footnote-ref-5)
6. [http://sbypresidenku.com/content/pengejawantahan\_ekonomi\_Islam](http://sbypresidenku.com/content/pengejawantahan_ekonomi_islam) [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://eei.fe.umy.ac.id/index.php?option=page&id=94&item=265>. Yahya bin Adam (w. 203 H) juga menulis kitab dengan judul dan tema yang sama, yaitu *Al-Kharaj.*Untuk melihat isinya lebih lanjut, lihat Abu Zakariya Yahya bin Adam bin Sulaiman al-Qurasyi, *Al-Kharaj,*Maktabah Syamilah. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya>’ Ulumiddi>n,*Maktabah Syamilah, jilid 2 hlm. 417 dan seterusnya. Juga, jilid 3 hlm. 191 dan seterusnya. [↑](#footnote-ref-8)
9. [http://id.shvoong.com/books/1834907-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam](http://id.shvoong.com/books/1834907-sejarah-pemikiran-ekonomi-islam/). [↑](#footnote-ref-9)
10. Prof. Dr. Abdul Karim, M.A., M.A, 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam,* Pustaka Book Publisher, Jogjakarta, cet. 2, 283. [↑](#footnote-ref-10)
11. <http://eei.fe.umy.ac.id/index.php?option=page&id=94&item=265>. Lihat juga, Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah,*Maktabah Syamilah.  [↑](#footnote-ref-11)
12. Agustianto dalam <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=100> [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah,*Maktabah Syamilah, Jilid 1, hlm. 214 dan seterusnya. Lihat juga, <http://eei.fe.umy.ac.id/index.php?option=page&id=94&item=265> [↑](#footnote-ref-13)